

**PENGARUH PENERAPAN PPH PASAL 21 TERHADAP
MOTIVASI DAN KEPUASAN PEGAWAI TETAP
PT. RIAU MUDA JASA SARANA PEKANBARU
DALAM MEMBAYAR PAJAK**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Sarjana Lengkap Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru**



OLEH

MESI ARISANDI
Nim: 10573002089

JURUSAN AKUNTANSI S1

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2009**

ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN PPh PASAL 21 TERHADAP MOTIVASI DAN KEPUASAN PEGAWAI TETAP PT. RIAU MUDA JASA SARANA PEKANBARU DALAM MEMBAYAR PAJAK

Oleh : Mesi Arisandi

Penelitian ini untuk melihat pengaruh penerapan PPh pasal 21 terhadap motivasi dan kepuasan pegawai tetap PT. Riau Muda Jasa Sarana Pekanbaru dalam membayar pajak. Untuk mengukur pengaruh penerapan PPh pasal 21 terhadap motivasi dan kepuasan pegawai tetap PT. Riau Muda Jasa Sarana Pekanbaru, maka yang dijadikan variabel independen adalah penerapan PPh pasal 21 (X). Sedangkan untuk variabel dependen adalah motivasi pegawai tetap (Y1) dan kepuasan pegawai tetap (Y2) dalam membayar pajak. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensus, yang meliputi seluruh pegawai tetap PT. Riau Muda Jasa Sarana Pekanbaru yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi hipotesis, setelah diuji menggunakan SPSS versi 16.0.

Hipotesis pertama menyatakan bahwa Penerapan PPh pasal 21 akan berpengaruh positif terhadap motivasi pegawai tetap dalam membayar pajak. Hasil analisis regresi sederhana untuk menguji hipotesis pertama menunjukkan nilai R^2 Adjusted sebesar 0,655 atau sebesar 65,5 % dan nilai p -value sebesar 0,000. Nilai R^2 Adjusted sebesar 65,5 % berarti perubahan yang terjadi pada motivasi pegawai dalam membayar pajak 65,5% disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada penerapan PPh 21 oleh perusahaan, sementara sisanya sebesar 34,5 % disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. Selain itu, p -value sebesar $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa penerapan PPh pasal 21 berpengaruh secara signifikan terhadap nilai motivasi pegawai dalam membayar pajak.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa Penerapan PPh pasal 21 akan berpengaruh positif terhadap kepuasan pegawai tetap dalam membayar pajak. Hasil analisis regresi sederhana untuk menguji hipotesis kedua menunjukkan p -value sebesar 0,004 dan R^2 Adjusted sebesar 0,230 atau sebesar 23%. p -value sebesar $0,004 < 0,05$ yang berarti bahwa penerapan PPh pasal 21 oleh perusahaan akan berpengaruh positif terhadap kepuasan pegawai tetap dalam membayar pajak. Selain itu, nilai R^2 Adjusted sebesar 23 % menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada kepuasan pegawai dalam membayar pajak 23 % disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada penerapan PPh pasal 21, dan sisanya sebesar 77 % disebabkan oleh variabel-variabel lain diluar persamaan regresi misalnya : bonus yang diberikan, Pekerjaan itu sendiri (Work It self), Atasan (Supervision), Promosi (Promotion), Gaji atau Upah (Pay.)

Kata kunci : Penerapan PPh Pasal 21, Motivasi Dan Kepuasan

DAFTAR ISI

ABSRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II : TELAAH PUSTAKA	
A. Teori Motivasi.....	9
B. Teori Kepuasan.....	16
C. Kepatuhan Wajib Pajak dan Peraturan Perpajakan	20
D. Pengertian Pajak PPh pasal 21	21
E. Asas Pemungutan Pajak.....	28
F. Teori Pemungutan Pajak	30
G. Pajak Dalam Konsep Islam	32
H. Pajak dan Zakat	35
I. Kerangka Skematis Model Penelitian	40

J. Pengembangan Hipotesis	40
---------------------------------	----

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian	44
B. Populasi dan Sample Penelitian.....	44
C. Jenis dan Sumber Data	45
D. Variabel penelitian	45
E. Teknik pengumpulan data	48
F. Model Penelitian	49
G. Metode Analisis Data	51

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Responden	58
B. Kualitas Data	59
C. Uji Statistik Deskriptif.....	62
D. Uji Normalitas (<i>Uji Kolmogorov-Smirnov</i>).....	62
E. Uji Asumsi Klasik	63
F. Analisis Regresi Sederhana	68

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Keterbatasan Penelitian	75
C. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung. Menurut APBN sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan, meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri.

Hal ini bisa dibuktikan saat negara kita dilanda krisis berkepanjangan sampai saat inipun masih diragukan apakah negara kita bisa menumbuhkan keadaan perekonomian. Dimana sektor pajak masih tetap memiliki nilai besar bahkan mengalami kenaikan serta menembus sampai pada prosentase terbesar dari sektor non migas sementara sektor non migas cenderung mengalami penurunan dan juga bantuan luar negeri yang bunganya bisa membesar seiring fluktuasi mata uang dolar terhadap rupiah.

Terlepas dari uraian di atas, perlu diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya sehingga terbentuk suatu masyarakat yang

adil dan makmur, tenteram, aman yang merata bagi seluruh bangsa Indonesia. Negara juga mempunyai beberapa kewajiban yang paling utama yaitu melindungi rakyat dengan segala kepentingannya dan menyediakan sarana serta fasilitas yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada rakyat, mempertahankan hukum, memelihara ketertiban dan keamanan negara.

Untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut negara membutuhkan sumber-sumber penghasilan seperti penghasilan perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penghasilan dari barang-barang milik negara, penghasilan dari denda dan sitaan barang karena suatu pelanggaran, hibah dan sumbangan dari negara lain atau organisasi internasional maupun penghasilan dari hak-hak waris dan penerimaan dari berbagai macam pajak, retribusi, bea, dan cukai serta bentuk-bentuk pungutan lainnya.

Dari sumber-sumber penerimaan negara tersebutlah, pajak merupakan sumber yang paling dominan karena hal tersebut terbukti dari angka yang terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak terus mengalami peningkatan. Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan merupakan primadona dalam membiayai pembangunan nasional.

Slogan yang sering di seru-serukan bahwa “orang bijak bayar pajak”, dari slogan tersebut timbullah makna bahwa setiap wajib pajak yang telah memiliki NPWP wajib mentaati peraturan pemerintah dalam memayar pajak. Kegiatan

tersebut dapat dilihat dari pegawai tetap yang memiliki gaji dari tempat mereka bekerja telah dipotong oleh pajak penghasilan.

Secara umum tujuan perusahaan adalah untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat yang secara khusus untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Selain itu juga perusahaan memberikan haknya kepada pegawai berupa gaji yang biasanya diterima oleh pegawai tetap tiap bulan, setelah pegawai melakukan kewajibannya sebagai pihak internal dari dalam perusahaan. Dan tentu saja dari gaji yang diterima oleh karyawan atau pegawai tetap di kenai pajak, yaitu pajak PPh pasal 21 atau yang sering dikenal dengan sebutan pajak penghasilan.

Dari pajak penghasilan tersebut, maka timbullah Undang-undang penghasilan pegawai tetap, sebagai mana diatur dalam keputusan **Direktur Jenderal Pajak KEP-545 /PJ/2000** dan telah diubah dengan peraturan **Direktur Jenderal pajak nomor: 15 /PJ/ 2006**. Dan telah diubah kembali dengan peraturan **pajak nomor: 36 tahun 2008**. Dimana pajak dibentuk oleh Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Pada APBD 2005, sumbangan dari pajak mencapai Rp 239 triliun atau sekitar 80 persen dari total penerimaan Negara, dan perlu diketahui juga bahwasanya PPh pasal 21 merupakan penyumbang terbesar ketiga bagi APBN dari total penerimaan pos pajak yang dipotong dari gaji pegawai atau karyawan sebagai wajib pajak.

Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak sebagaimana telah di jelaskan dalam pengertian pajak itu sendiri, lalu seperti apa fungsi pajak itu sebenarnya? Dan apakah fungsi pajak selama ini dapat dikatakan telah tepat sasaran?

Pada kenyataan yang ada, pengumutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, tidak sesuai dengan janji-janji yang ditawarkan oleh pemerintah itu sendiri, dan ini menjadi persoalan yang pelik ditengah masyarakat, dimana masyarakat pada umumnya sebagai wajib pajak yang memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, dan khususnya pada pegawai tetap.

Jika hal yang seperti ini telah terjadi di negara Indonesia saat ini, bagaimana arah penerapan pajak PPh pasal 21 ini yang telah memotong penghasilan wajib pajak. Kondisi seperti ini tidak akan mendukung upaya **menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang patuh membayar pajak**, bahkan ada kecenderungan untuk berusaha menghindari kewajiban membayar pajak, atau motivasi membayar pajak oleh pegawai tetap akan berkurang, dan kepuasan pegawai seperti apa yang timbul nantinya.

Jika melihat keadaan yang riil seperti ini, apakah karyawan tetap yang mendapat pemotongan gaji, atas penerapan pajak PPh pasal 21 ini yang gunanya untuk membayar pajak demi pembangunan Negara ini termotivasi, untuk

membayar pajak jika kontribusi yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri mengecewakan wajib pajak. Dan jika motivasi berpengaruh oleh adanya pajak PPh pasal 21 yang tidak sesuai dengan kontribusi yang diberikan, apakah kepuasan pegawai tetap menjadi penentu yang begitu berpengaruh sebagai wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengumutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah demi perkembangan sektor sarana dan fasilitas untuk pembangunan Negara, jika melihat kenyataan yang ada begitu tidak sesuai dengan fungsi pajak itu sendiri. Bagaimana pegawai tetap menyikapi fenomena yang terjadi saat ini. Dan seperti apa motivasi pegawai tetap dalam membayar pajak, jika melihat dari sisi yang terjadi, apakah motivasi pegawai dalam membayar pajak meningkat, stabil, atau pun malah menurun.

Dan bagaimana dengan kepuasan pegawai tetap dalam membayar pajak, apakah mereka selaku wajib pajak telah merasa puas dengan kontribusi yang diberikan pajak, jika kondisi yang ada saat ini menjauhkan dari fungsi pajak itu sendiri, apakah kepuasan pegawai tetap dalam membayar pajak meningkat, stabil atau menurun.

Jika benar penerapan pajak PPh pasal 21 dapat mempengaruhi motivasi, dan kepuasan pegawai tetap dalam membayar pajak, untuk itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Pengaruh Penerapan PPh Pasal 21 terhadap Motivasi dan Kepuasan Pegawai Tetap PT. RIAU MUDA JASA SARANA PEKANBARU dalam Membayar Pajak”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan PPh Pasal 21 berpengaruh terhadap Motivasi Pegawai Tetap PT. Riau Muda Jasa Sarana Pekanbaru dalam Membayar Pajak?
2. Apakah Penerapan PPh Pasal 21 berpengaruh terhadap Kepuasan Pegawai Tetap PT. Riau Muda Jasa Sarana Pekanbaru dalam Membayar Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Variabel diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh Penerapan PPh Pasal 21 terhadap Motivasi Pegawai Tetap PT. Riau Muda Jasa Sarana Pekanbaru dalam Membayar Pajak.
2. Pengaruh Penerapan PPh Pasal 21 terhadap Kepuasan Pegawai Tetap PT. Riau Muda Jasa Sarana Pekanbaru dalam Membayar Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pegawai

Dengan dilaksanakan penelitian ini, seperti apa penerapan pajak PPh pasal 21, dan apakah kontribusi yang selama ini diberikan oleh pajak itu sendiri telah memuaskan.

2. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan empiris kepada penulis mengenai pengaruh penerapan PPh pasal 21 di Indonesia; khususnya pengaruh terhadap

Motivasi dan kepuasan pegawai tetap dalam membayar pajak, disamping pengetahuan konseptual yang telah penulis miliki.

3. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan kepustakaan dan referensi empiris mengenai Pengaruh Penerapan PPh Pasal 21 terhadap Motivasi dan Kepuasan Pegawai Tetap dalam Membayar Pajak.

4. Diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pihak yang akan melaksanakan penelitian sejenis untuk selanjutnya tentang penerapan pemotongan PPh pasal 21 terhadap motivasi dan kepuasan pegawai tetap dalam membayar pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini diuraikan dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan yang menyajikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Mengemukakan tinjauan yang berisikan tentang teori Motivasi, dan Kepuasan pegawai tetap, kepatuhan wajib pajak dan teori motivasi, kepatuhan wajib pajak dan teori kepuasan, kepatuhan wajib pajak dan peraturan perpajakan, pengertian pajak dan pajak

PPh pasal 21, pajak dan zakat, asas pengumutan, dan teori pengumutan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode penelitian, sifat penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang dipergunakan.

BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat hasil penelitian yang telah dilakukan meliputi analisis data yang telah dikumpulkan serta pembahasan hasil pengolahan data.

BAB V : PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan, tentang penelitian yang dilakukan serta saran-saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Teori Motivasi

Menurut **Rivai (2004:455)**, Motivasi adalah serangkainya sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Motivasi berasal dari kata Latin “*movere*” yang berarti dorongan atau menggerakkan (**Winardi, 2001:1**).

Stevenson dalam **Winardi (2001:1)** menyatakan “motivasi berarti insentif, dorongan atau stimulus untuk bertindak”. Motivasi merupakan suatu hal verbal, fisik atau psikologis yang membuat seseorang melakukan sesuatu sebagai respon.

Petri dalam **Winardi (2001:5)** menyatakan, “motivasi merupakan sebuah konsep *eksplanatonis* yang kita manfaatkan untuk memahami perilaku-perilaku yang kita amati”. Perlu kita ingat bahwa motivasi *diinferensi*. Kita tidak mengukurnya secara langsung, tetapi memanipulasi kondisi-kondisi tertentu setelah kita mengobservasi bagaimana perilaku berubah”.

Robert menyatakan (**2004:2**), dasar bagi segala motivasi adalah harapan, oleh karna itu, adalah syarat awal agar seseorang dapat termotivasi. Harapan adalah penyebab bagi sesuatu yang dihasilkan dan bahan bakar yang memberi tenaga kepada mesin. Tanpa harapan, tak seorangpun bisa termotivasi.

Menggerakkan Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu yang *invisible* yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu bertindak laku dalam mencapai tujuan. Dorongan tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu: arah perilaku (kerja untuk mencapai tujuan), dan kekuatan perilaku (seberapa kuat usaha individu dalam bekerja). Motivasi meliputi perasaan unik, pikiran dan pengalaman yang merupakan bagian dari hubungan internal dan eksternal perusahaan.

Sedemikian uniknya dan pentingnya motivasi, banyak ahli filsafat, sosial, psikologi maupun ahli manajemen melakukan penelitian dan mengeluarkan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan bagaimana individu termotivasi. Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada motivasi jika tidak dirasakan adanya kebutuhan dan kepuasan serta ketidak-seimbangan (**Mangkunegara, 2007:93**).

Didalam mengkaji teori dari motivasi sebetulnya cukup menarik dan teorinya dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan atas (**Siagian, 2006:290**):

1. Teori kepuasan (*Content Theory*) yang memusatkan pada apa-nya motivasi.
2. Teori motivasi proses (*Process Theory*) yang memusatkan pada bagaimananya motivasi.
3. Teori Pengukuhan (*Reinforcement Theory*) yang menitik beratkan pada dimana perilaku dipelajari

Berikut teori-teori yang dikeluarkan oleh beberapa ahli filsafat dan sosial maupun psikologi.

1. Teori Penghargaan (*Expectancy theory*)

Vroom dalam Siagian (2002:292) menyatakan bahwa, “Dorongan atau kekuatan saja tidaklah cukup untuk mendorong seseorang melakukan suatu tindakan. Keyakinan bahwa usaha yang dilakukan seseorang akan menghasilkan prestasi yang diharapkan, justru merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang”.

Semakin besar sebuah prestasi memberikan hasil yang diharapkan, semakin besar pula kemungkinan seseorang mencoba berperilaku untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Ada dua jenis penghargaan dalam teori ini, yakni *effort performance expectancy* dan *performance outcome expectation*.

Effort performance expectancy adalah persepsi seseorang terhadap usaha untuk mencapai prestasi tertentu berikut kemungkinan konsekuensinya. *Performance outcome expectation* adalah persepsi seseorang bahwa setiap prestasi akan dihubungkan dengan konsekuensi tertentu baik positif maupun negatif (imbalan dan hukuman).

2. Teori Keadilan (*Equity Theory*)

Adams dalam Mangkunegara (2004:475), yang bekerja sebagai peneliti di bidang psikologi bekerja sama dengan *General electric Co di Continville*, New York mengembangkan dan melakukan pengujian terhadap *Equity Theory*.

Equity theory “Pada dasarnya seseorang akan melakukan perhitungan upaya dan penghargaan (*effort and reward*) yang diperoleh, selanjutnya pada saat yang sama membandingkannya dengan apa yang terjadi pada orang lain”. Teori

ini menganggap bahwa motivasi seseorang dalam melakukan aktivitas didorong oleh perlakuan yang adil dibandingkan dengan yang diperoleh orang lain.

3. Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting*)

Locke dalam **Siagian (2006:291)** menyatakan bahwa, “perilaku seseorang sangat ditentukan oleh tujuan yang dikehendaki (*conscious goal*) dan keinginan-keinginan (*interions*)”. Pemahaman seseorang terhadap tujuan yang dikehendaki sangat penting pada *goal setting theory*. Tujuan yang dikehendaki (*conscious goals*) disimbolkan dalam beberapa atribut antara lain: *goal specificity*, *goal difficulty*, dan *goal intensity*. *Goal specificity* adalah ukuran kuantitatif tujuan, *goal difficulty* adalah tingkat kesulitan pencapaian tujuan, sedang *goal intensity* adalah proses penetapan tujuan.

Menurut teori **Maslow** dalam **Siagian (2006:287)**, motivasi yang dikembangkan pada tahun 40-an pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai lima tingkat kebutuhan yaitu:

1. Kebutuhan fisikologikal,(sandang, pangan, papan).
2. Kebutuhan keamanan.
3. Kebutuhan sosial.
4. Kebutuhan presties, yang tercermin pada symbol-simbol status.
5. Aktualisasi diri.

Motivasi menurut **Teori Alderfer** Yaitu (ERG), *Exixtence, Relatedness, Growth*, dalam **Siagian (2006:290)**, jika dilihat lebih lanjut akan terlihat hubungan bahwa:

- a. Makin tidak terpenuhinya suatu kebutuhan tertentu, makin besar pula keinginan untuk memuaskannya.

- b. Kuatnya keinginan memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi semakin besar apabila kebutuhan yang lebih rendah telah dipenuhi.
- c. Sebaliknya, semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi, semakin besar keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih mendasar.

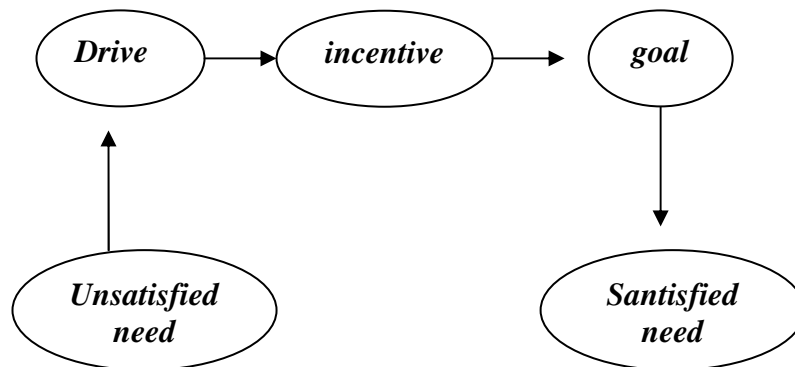
Motivasi menurut teori **Herzberg** dalam **Siagian (2006:290)** yaitu teori “model dua faktor” yaitu faktor *Motivasioner* dan faktor *Higine* (pemeliharaan), *motivasioner* adalah hal-hal yang pendorong berprestasi yang sifatnya bersumber dalam diri seseorang, dan faktor *higine* adalah yang bersumber dari luar diri seseorang.

Sebagaimana yang dikutip oleh **Sperling** dalam **Mangkunegara (2007:183)**, mengemukakan bahwa “motif didefinisikan sebagai suatu kecenderungan untuk beraktivitas, dimulai dari dorongan dalam diri dan diakhiri dengan penyesuaian diri”.

Sebagaimana yang dikutip oleh **Stansion** “motif adalah suatu kebutuhan yang distimulasi yang berorientasi kepada tujuan individu dalam mencapai rasa puas” (**Mangkunegara, 2007:94**).

Untuk melihat hubungan motivasi sebagai pembangkit dorongan, maka dapat dilihat melalui gambar dibawah ini.

Gambar II.1 Motivasi Sebagai Pembangkit Dorongan



Keterangan: Bilamana suatu kebutuhan tidak terpuaskan maka timbul *drive* dan aktivitas individu untuk merespon perangsang (*incentive*) dalam tujuan yang di inginkan. pencapaian Tujuan akan menjadikan individu merasa puas.

Sumber: Manajemen Perusahaan (Mangkunegara, 2007:94)

Menurut Rivai (2001:457), motivasi dapat disimpulkan :

1. Sebagai suatu kondisi mengerakkan manusia kearah suatu tujuan tertentu.
2. Suatu keahlian dalam mengarahkan karyawan dan perusahaan agar mau bekerja secara berhasil, sehingga keinginan karyawan dan tujuan perusahaan sekaligus tercapai.
3. Sebagai inisiasi dan pengarahan tingkah laku. Pelajaran motivasi sebenarnya merupakan pelajaran tingkah laku.
4. Sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri.
5. Sebagai kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara prilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja.

2.1. 1. Kepatuhan Wajib Pajak dan Teori Motivasi

Kepatuhan adalah perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut pengamatan ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara

formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan (batas waktu penyampaian SPT tahunan).

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara hakekatnya memenuhi semua ketentuan perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Perilaku individu atau kelompok sangat dipengaruhi oleh motivasi. Motivasi adalah dorongan yang dapat menimbulkan dan mengarahkan perilaku. Besarnya motivasi akan berpengaruh terhadap intensitas perilaku (termotivasi, tanpa motivasi, dan apatis) dan kesesuaian dengan tujuan perilaku (efektif, tidak efektif) (Pengaruh Teori Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)<http://social-pajak.blogspot.com/2008/04/pengaruh-teori-motivasi-terhadap.html>

Pengaruh motivasi terhadap perilaku secara teoritis dapat dibahas melalui kajian struktur (*content theory*), dan kajian proses (*process theory*). *Content theory* menitik beratkan kepada faktor-faktor yang melekat pada individu yang dapat menimbulkan, mengarahkan, mempertahankan, dan menghentikan perilaku. *Process theory*, menjelaskan dan menganalisa bagaimana perilaku dimunculkan, diarahkan, dipertahankan dan dihentikan.

Dari pembahasan *content theory*, kepatuhan wajib pajak sangat terkait dengan kepentingan atau kebutuhan yang harus terpenuhi, kebutuhan wajib pajak adalah menghitung besarnya pajak yang pantas. Pajak yang pantas adalah besarnya pajak yang secara yuridis tidak melanggar peraturan perpajakan dan secara ekonomis tidak memberatkan keuangan wajib pajak.

Motivasi adalah konsep yang abstrak, untuk dapat mengukur pengaruhnya terhadap perilaku dilakukan dengan menduga (*infred*) dan memanipulasi gejalanya (*manipulated*) yang berhubungan dengan perilaku. Motivasi yang mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi intensitas wajib pajak dalam mengisi dan memasukkan Surat pemberitahuan Pajak (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Banyaknya SPT yang dimasukkan ke KPP berpengaruh terhadap besarnya nilai rupiah dana yang terhimpun dan jumlah wajib pajak yang terjaring. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh motivasi membayar pajak dapat diukur berdasarkan jumlah rupiah dana yang terhimpun dan jumlah wajib pajak yang terjaring dari sektor perpajakan.

2.2. Teori Kepuasan

Dalam Mangkunegara (2004:475), teori tentang kepuasan yang cukup dikenal adalah:

1. Teori ketidak sesuaian (*discrepancy theory*). Teori ini mengukur kepuasan seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan.
2. Teori keadilan (*equity theory*) teori ini mengemukakan bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas, tergantung pada ada atau tidaknya keadilan (*equity*) dalam suatu situasi. Menurut teori ini komponen utama dalam teori keadilan adalah input, hasil, keadilan, dan ketidakadilan.

3. Teori Dua Faktor (*two factor theory*) menurut teori ini kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja itu merupakan hal yang berbeda.

Kepuasan adalah sebuah kondisi akhir (*an end state*) yang timbul karena dicapainya tujuan tertentu (**Winardi, 2001:137**). Sementara itu, sesuai dengan teori keinginan relatif atau *Relative Deprivation Theory* (**Rivai, 2004:477**), ada enam kepuasan penting menyangkut kepuasan dengan pembayaran menurut teori ini adalah:

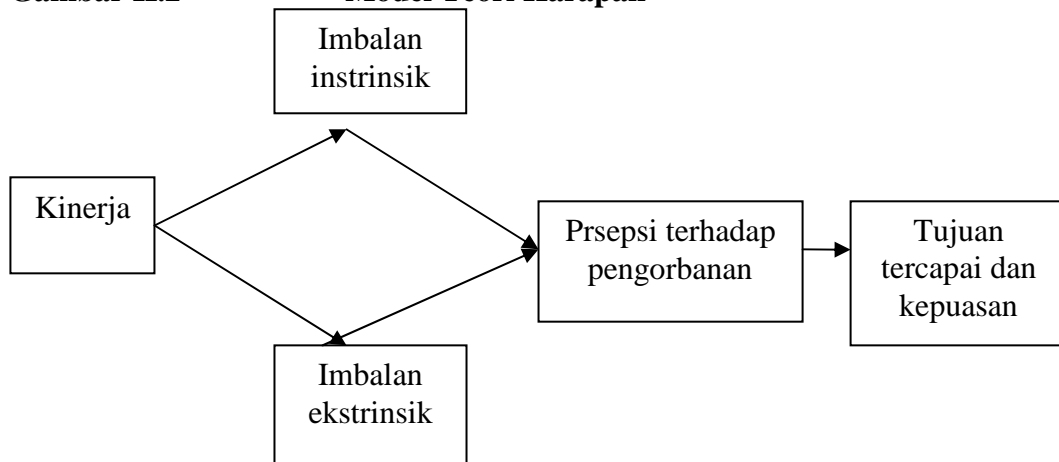
- a. Perbedaan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan.
- b. Perbedaan antara pengeluaran dengan penerimaan
- c. Ekspektasi untuk menerima pembayaran lebih
- d. Ekspektasi yang rendah terhadap masa depan
- e. Perasaan untuk memperoleh lebih dari yang diinginkan
- f. Perasaan secara personal tidak bertanggung jawab terhadap hasil yang buruk

Bohari (2006:40), menyatakan apakah kepuasan dapat ditingkatkan atau tidak, tergantung dari apakah imbalan sesuai dengan ekspektasi, kebutuhan dan keinginan. Bilamana pemerintah kurang memperhatikan pelayanan yang baik terhadap warganya, maka warga Negara akan berkurang kesadarannya untuk memberikan kontraprestasi dalam membayar pajak. Kesadaran membayar pajak merupakan salah-satu aspek atau bagian kesadaran berwarga Negara. Kesadaran membayar pajak juga dipengaruhi oleh efesiensi dan efektifitas kegiatan pemerintah.

Dari yang dipaparkan diatas agar lebih mudah memahami teori harapan dalam mencapai rasa puas, maka dapat dilihat gambaran dibawah ini.

Gambar II.2

Model Teori Harapan



Sumber: Manajemen Sumberdaya Manusia Perusahaan (Rivai, 2004 :468)

Menurut **Rivai (2004:468)** model teori harapan mempunyai sejumlah implikasi nyata, yaitu:

- Menentukan imbalan yang dinilai oleh setiap pegawai tetap.
- Menentukan kinerja yang diinginkan
- Mengkaitkan imbalan dengan kinerja
- Menganalisis faktor-faktor yang mengurangi efektifitas imbalan
- Memastikan imbalan mencukupi.

2.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak Dan Teori Kepuasan

Dari kepuasan *process theory*, perilaku patuh dalam membayar pajak dapat didorong dengan menciptakan peraturan yang dapat mengakomodasi dan mendinamisasi; sanksi dan insertif (*reinforcement theory*), harapan (*expectancy theory*), rasa keadilan (*equity theory*), dan tujuan (*goal setting theory*) yang terkait dengan kebijakan perpajakan http://id.wikipedia.org/wiki/Kepuasan_Kerja

Mengapa wajib pajak dan calon wajib pajak tidak patuh? Jawabannya bisa bervariasi. Sebab yang pertama, bahwa bila seorang bekerja dan kemudian dapat

menghasilkan uang, maka secara naluriah uang itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya.

Tapi pada saat yang bersamaan jika telah memenuhi beberapa syarat tertentu timbul kewajiban untuk membayar pajak. disini timbul konflik, antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan Negara. Pada umumnya kepentingan pribadi dan keluarga selalu menang, Ini disebabkan antara lain (**dalam Bohari, 2006:57**).

- a. Wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara.
- b. Kurang patuh kepada pemerintah
- c. Kurang menghargai hukum
- d. Tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan.
- e. Penghamburan keuangan Negara yang berasal dari pajak.

Dari faktor ini dapat dilihat seberapa besar kepuasan yang di dirasakan dari pajak itu sendiri. Jadi kepuasan wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu penelitian di Chile , Amerika Latin. Dalam **Bohari (2006:59)**, delapan sebab mengapa seseorang tidak mau membayar pajak dibawah judul: *why I don't want to pay my tax* , yakni:

- 1. Karena saya tidak menerima manfaatnya.
- 2. Karena tetangga saya juga tidak membayar pajak.
- 3. Karena jumlah pajaknya terlalu besar.
- 4. Karena mereka mencuri uang saya.
- 5. Karena saya tidak tahu cara melaksanakannya.
- 6. Karena saya telah mencoba tapi saya tidak mampu.
- 7. Karena jika mereka menangkap saya, maka saya akan dapat menyelesaikanya.
- 8. Walaupun saya tidak bayar, tidak akan terjadi apa-apa.

Dari penelitian yang telah dilakukan tersebut, kepatuhan dalam membayar pajak sesungguhnya dapat di perbaiki dari fungsi yang harus tepat sasaran, pelayanan yang lebih ditingkatkan, dan tentunya yang menjadi dasar sesungguhnya adalah pribadi wajib pajak itu sendiri, yang akan dapat menimbulkan rasa puas dalam membayar pajak.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak dan Peraturan Perpajakan

Peraturan perpajakan dibuat untuk mengatur mekanisme pemungutan pajak yang membatasi perilaku fiskus dan wajib pajak. Wajib pajak adalah orang dan kumpulan orang-orang. Perilaku manusia baik secara individu maupun secara kelompok dalam merespon aturan tidak berjalan secara mekanistik seperti pada sebuah mesin. Peraturan perpajakan harus netral dan tidak memihak kepada fiskus maupun wajib pajak. Peraturan perpajakan harus mengakomodasi kepentingan fiskus dan wajib pajak secara adil.

Peraturan perpajakan yang adil atau baik harus mempertimbangkan teori, azaz, dan sistem perpajakan, yaitu kemudahan, keadilan, kepastian hukum (azaz), dan partisipasi wajib pajak (teori dan sistem), tanpa harus mengorbankan tujuan yang akan dicapai oleh fiskus.

Walaupun telah tersedia ancaman hukuman administrasi maupun ancaman pidana, bagi wajib pajak yang tidak patuh terhadap pajak. Akan tetapi ,pada kenyataanya masih banyak wajib pajak yang tidak atau belum sepenuhnya memenuhi kewajibanya.

Hasil penelitian menunjukkan, **kesadaran Wajib Pajak** yang diukur dari persepsi Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik Wajib Pajak dan penyuluhan perpajakan. **Kepatuhan Wajib Pajak** yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak “berpengaruh signifikan” terhadap kinerja penerimaan pajak. Demikian juga ternyata ditemukan bahwa ada perbedaan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak besar dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak Besar ternyata lebih tinggi kesadaran dan kepatuhannya dibandingkan Wajib Pajak Kecil. Pengaruh Teori Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. <http://social-pajak.blogspot.pengaruh-teori-motivasi-terhadap.html>

2.4. Pengertian Pajak PPh pasal 21

Pengertian pajak dari beberapa ahli sebagaimana yang dikutip oleh **Bohari (2006:13)** mengemukakan definisinya antara lain yaitu:

- a. **Adriani** mengemukakan pendapat bahwa: “Pajak adalah iuran kepada Negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak dapat prestasi kembali, yang gunanya untuk pembiayaan umum pemerintah”.
- b. **Smeets** mengemukakan pendapat bahwa: “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang menurut norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi langsung dalam hal individual”.

Sementara itu sebagaimana yang dikutip oleh **Gusfahmi (2007:22)**, dimana **Soemitro** mengemukakan pendapat bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi-definisi di atas dapatlah dirangkum esensi dari pengertian pajak :

- a. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah.
- b. Pengenaannya harus diatur dengan undang-undang.
- c. Dapat dipaksakan.
- d. Untuk keperluan pembiayaan umum.
- e. Kontraprestasi tidak langsung.

Esensi yang terangkum di atas adalah hal-hal yang membedakan pengertian pajak dengan pungutan lain. Hal-hal yang membedakan antara pajak dengan pungutan lain seperti: retribusi, sumbangan, dan cukai, terletak pada tingkat peraturan yang mengaturnya dan kontraprestasi yang diperolehnya. Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas obyek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hadiah dan lain-lain. Pajak merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparatur pajak.

Dengan berlakunya UU KUP No. 28 Tahun 2007, maka wajib pajak harus melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan perpajakannya secara lebih

benar dan tepat waktu. Pajak dalam arus perekonomian, terdiri dari titik-titik penerimaan dan pengeluaran.

Dalam **Soemarso (2007:17)**, titik pengenaan serta jenis pajaknya adalah sebagai berikut:

1. Pada titik pendapatan rumah tangga, pajak dapat dikenakan atas upah dan gaji dan deviden serta bunga. Jenis pajak ini adalah pajak penghasilan.
2. Pada titik konsumsi rumah tangga, jenis pajaknya berupa pajak pertambahan nilai.

Pajak penghasilan pada laba, deviden, dan bunga, laba ditahan yaitu apabila setelah jangka waktu tertentu laba tersebut tidak dibagikan tanpa ada rencana yang jelas. Maka diwajibkan oleh setiap orang yang berpenghasilan agar membayar pajak sebagaimana kewajibannya.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Perpajakan mengacu pada kebijaksanaan. Salah satu pajak yang dibebankan kepada wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang menjalankan suatu usaha adalah Pajak Penghasilan (PPh), atau juga dikenal dengan PPh pasal 21 (PPh karyawan).

Menurut **Azhari (2008:10)**, “PPh pasal 21 adalah wajib pajak yang melakukan pembayaran terhadap gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, maka wajib pajak

tersebut harus melakukan pemotongan pajak atas penghasilan tersebut sebelum dibayarkan kepada karyawan yang bersangkutan”.

Pajak penghasilan ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1983 yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 38 tahun 2008, dalam upaya mengamankan penerimaan Negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi.

Penghasilan sesuai dengan ketentuan UU pajak yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan (**Azhari, 2008:30**).

Dimana Undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara *self assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang (**Suandy, 2006:13**).

Perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment* menjadi *self assessment*, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dari penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak, karena penerimaan dari migas tidak dapat diandalkan lagi, sementara sumber dana dalam negeri hanya sebagai pelengkap.

Pemungutan pajak di suatu Negara, menurut Gunadi, dianggap sukses apabila terdapat enam kondisi pendukung, yaitu:

1. Sebagian besar aktifitas ekonomi dilaksanakan dalam transaksi uang.
2. Tingkat iliterasi (buta huruf) masyarakat rendah.
 1. Adanya praktek pembukuan (administrasi) yang sehat dan dapat dipercaya (*reliable*).
3. Tingkat kepatuhan dan disiplin yang tinggi.
 1. Tersedianya jaringan dan akses terhadap informasi serta komunikasi yang efektif dengan sedikit (menghilangkan) kerahasiaan (untuk tujuan perpajakan).
 2. Rendahnya tingkat sektor (ekonomi) informal (*underground, black market economy*).

Sejak diterapkannya sistem *self assessment* dalam undang-undang perpajakan Indonesia, peranan positif Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (*tax compliance*) menjadi semakin mutlak diperlukan. Agar sistem *self assessment* berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegak hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan/penyidikan pajak dan penagihan pajak. Pemeriksanaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuannya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang Wajib Pajak (**Priatara 2000**), kepatuhan ini akan sangat berdampak baik secara

langsung maupun tak langsung pada penerimaan pajak. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa besar pajak dapat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya, dan pelaksanaan pajak.

<http://t1k4r.wordpress.com/2009/10/10/pengaruh-penerapan-self-assessment-system-terhadap-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-badan-pada-kpp-dki-jakarta-khususnya-jakarta-pusat/>

Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 undang-undang pajak penghasilan, yaitu tarif yang berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh, Tarif pajak bagi WP orang pribadi yang ditetapkan pasal 17 ayat 1 huruf (a) UU PPh untuk dasar pengenaan pajak, dewasa ini, adalah sebagai berikut:

<u>Lapisan penghasilankena pajak (PKP)</u>	
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Tarif pajak penghasilan diterapkan atas PKP (penghasilan kena pajak), yakni suatu jumlah yang berasal dari penghasilan kotor setelah dikurangi berbagai potongan yang diperkenankan oleh undang-undang.

Tarif pajak penghasilan orang pribadi diterapkan atas penghasilan kotor dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan menghasilkan penghasilan netto. Penghasilan netto dikurangi dengan PTKP menghasilkan PKP.

Dimana penghasilan kena pajak pegawai tetap dihitung sebesar (**Azhari, 2008:117**) :

1. Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, managih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 1.296.000,00 setahun atau Rp 108.000,00 sebulan. Atau dapat dimaksudkan, dimana Biaya Jabatan adalah biaya yang sifatnya fiktif dan cerminan biaya 3M, sesuai dengan masa kerja dan melekat kepada pemberi kerja, untuk pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak. Biaya pensiun adalah Biaya fiktif sebagaimana biaya jabatan yang diberikan kepada pensiunan. Tarif untuk Biaya Jabatan adalah $5\% \times \text{Penghasilan Bruto}$ (Maksimal Rp.108.000/bulan atau Rp 1.296.000/tahun). Sedangkan Tarif untuk Biaya Pensiun adalah $5\% \times \text{Penghasilan Bruto}$ (Maksimal Rp.36.000/bulan atau Rp 432.000/tahun).
2. Iuran yang terkait dengan gaji

Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar ole pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh mentri keuangan atau badan penyelenggara tabungan hari tua.

PPh Pasal 21 = Penghasilan kena pajak x tarif pasal 17 UU Pph

Gibson menyatakan, "Motivasi pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Perilaku patuh wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel perilaku individu dan lingkungan.

Pengaruh Teori Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, April, 2008.
<http://social-pajak.blogspot.com/2008/04/pengaruh-teori-motivasi-terhadap.html>

Banyak warga masyarakat yang masih beranggapan bahwa pajak merupakan pungutan bersifat paksaan yang merupakan hak istimewa pemerintah dengan tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak (**Bohari, 2006:12**).

Kesejahteraan bagi rakyatnya. Oleh karena itu landasan filosofis pemungutan pajak didasarkan atas pendekatan "*Benefit Approach*" atau pendekatan manfaat. Ini adalah dasar fundamental atas dasar filosofi yang membenarkan pemungutan pajak sebagai pungutan yang dapat dipaksakan dalam arti mempunyai wewenang dengan kekuatan paksaan (**Bohari, 2006:36**).

Menurut **Bohari (2006:40)** Pemerintah memberikan *Public service* (pelayanan jasa) kepada warga negaranya baik secara perorangan ataupun secara kolektif, dan warga Negara memberikan kontraprestasi berupa uang dalam bentuk pembayaran pajak kepada pemerintah. Pemberian jasa oleh pemerintah kepada warganya yang dirasakan besar manfaatnya, akan menimbulkan rasa kesadaran yang tinggi untuk mengabdikan kepada Negara. Rendahnya kesadaran warga negara untuk membayar pajak kepada Negara banyak ditentukan oleh sejauh mana rakyat dapat mengenal dan menikmati manfaat jasa-jasa tersebut.

2.5 Asas Penggumutan Pajak

Bentuk manfaat yang bisa dinikmati oleh warga negara adalah: kesejahteraan, pelayanan umum, perlindungan hukum, kebebasan, penggunaan

fasilitas umum, pelayanan keamanan. Berikut ini asas-asas pengumutan pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain:

1. Menurut **Smith** dalam bukunya *Wealth of Nations* (**Bohari, 2006:41**) dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

- a. **Asas *Equality*** (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- b. **Asas *Certainty*** (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- c. **Asas *Convenience of Payment*** (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- d. **Asas *Efficiency*** (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2. Menurut **Langen** (**Bohari, 2006:42**), asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

- a. **Asas daya pikul:** besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
- b. **Asas manfaat:** pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
- c. **Asas kesejahteraan:** pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- d. **Asas kesamaan:** dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

- e. **Asas beban yang sekecil-kecilnya:** pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

3. Menurut **Wagner (Bohari, 2006:43)**, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

a. Asas politik finansial :

1. Pajak yang dipungut negara menghasilkan jumlah yang memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan Negara.
2. Pajak hendaknya dinamis, artinya penerimaan Negara dari pajak diharapkan selalu meningkatkan mengingat kebutuhan penduduknya selalu meningkat baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

b. Asas ekonomi: Penentuan obyek pajak harus tepat Misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah. Dalam artian pemilihan yang sangat tepat apakah hanya dikenakan pada pendapatan ataukah juga terhadap modal, dan atau pengeluaran. Pada umumnya yang paling adil untuk dikenakan pajak bagi wajib pajak adalah pajak pendapatan.

c. Asas keadilan: yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. Dan juga kesamaan beban, artinya bahwa setiap orang hendaknya beban pajak kira-kira sama.

d. Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.

e. Asas yuridis segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang. Kata-kata dalam undang-undang hendaknya tidak bermakna ganda, dalam arti tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.

2.6. Teori Pemungutan Pajak

Menurut **Sutrisno (2006:36)**, ada beberapa teori yang mendasari adanya pengumutan pajak, yaitu antara lain:

1. Teori asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.
2. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi dari pada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

Adriani berkomentar dalam **Sutrisno (2006:43)**, “jika kita melihat pengumutan pajak sebagai gejala masyarakat yang selamanya menunjukkan bentuk yang bermacam-macam, tetapi pajak itu juga merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan yang berlainan. Kalau sudah demikian kita dapat bertidak sedikit lebih bebas, yang terang tujuan suatu pajak akan mempunyai pengaruh bentuk progresif”.

Menurut **Lerner** seperti yang dikutip oleh **Bohari (2006:148)** ada dua akibat dengan dipungutnya pajak yaitu:

1. Akan memperbesar pendapatan Negara.
2. Akan mengurangi dana (*money incomes*) yang tersedia dalam masyarakat.

Yang penting menurut **Lerner** dalam **Bohari (2006:149)** adalah akibat yang kedua, “dimana dengan pengumutan pajak itu akan mengurangi tenaga beli masyarakat, disini pemerintah sebenarnya secara sadar bertujuan untuk mengurangi

pendapatan uang dalam masyarakat di dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tingkat pendapatan nasional yang layak”.

Didalam pemungutan pajak terdapat dasar hukum pemungutannya (**Bohari, 2006:31**).

a. Pasal 23 ayat 1 UUD 1945

Anggaran pendapatan dan belanja Negara ditetapkan dengan UU. Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu.

b. Pasal 23 ayat 2 UUD 1945

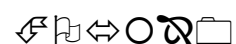
Segala pajak untuk Negara berdasarkan undang-undang.

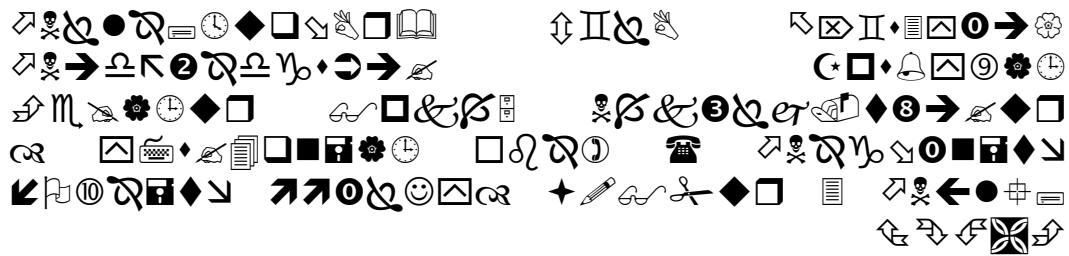
Bracewell dan **Milnes** mengatakan dalam **Suandy (2008:12)**, “ semakin besar beban pajak, semakin kuat motif, dan semakin luas ruang lingkup terjadinya penghindaran pajak”.

2.7. Pajak Dalam Konsep Islam

Dalam konsep syariah Islam secara etimologi pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah *Dharibah* yang artinya: kewajiban, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (**Gusfahmi, 2007:27**).

Allah berfirman





Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan^[658] dan mensucikan^[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(al-qur'an, al- taubah 103).

2.7.1. Definisi Pajak Menurut Syariah

Kaum muslim sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman yang jelas menurut pemahaman Islam, sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Swt. Jika itu bukan perintah , maka bukanlah ibadah (**Gusfahmi, 2007:26**).

Terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu:

1. diwajibkan oleh Allah Swt
2. objeknya adalah harta
3. subjeknya kaum muslim yang kaya, tidak termasuk non- muslim
4. tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim saja)
5. diberlakukan karna kondisi darurat

kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan Negara menurut sistem ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur (**Gusfahmi, 2007:33**).

1. Harus adanya nash yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pengumutan.
2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslim dan non-muslim
3. Sistem pengumutan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
4. Adanya tuntutan kemasyalatan umum.

Dengan definisi diatas, jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh ulil ambri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat.

Allah berfirman:

𐀀 𐀁 𐀂 𐀃 𐀄 𐀅 𐀆 𐀇 𐀈 𐀉 𐀊 𐀋 𐀌 𐀍 𐀎 𐀏 𐀐 𐀑 𐀒 𐀓 𐀔 𐀕 𐀖 𐀗 𐀘 𐀙 𐀚 𐀛 𐀜 𐀝 𐀞 𐀟 𐀠 𐀡 𐀢 𐀣 𐀤 𐀥 𐀦 𐀧 𐀨 𐀩 𐀪 𐀫 𐀬 𐀭 𐀮 𐀯 𐀰 𐀱 𐀲 𐀳 𐀴 𐀵 𐀶 𐀷 𐀸 𐀹 𐀺 𐀻 𐀼 𐀽 𐀾 𐀿 𐁀 𐁁 𐁂 𐁃 𐁄 𐁅 𐁆 𐁇 𐁈 𐁉 𐁊 𐁋 𐁌 𐁍 𐁎 𐁏 𐁐 𐁑 𐁒 𐁓 𐁔 𐁕 𐁖 𐁗 𐁘 𐁙 𐁚 𐁛 𐁜 𐁝 𐁞 𐁟 𐁠 𐁡 𐁢 𐁣 𐁤 𐁥 𐁦 𐁧 𐁨 𐁩 𐁪 𐁫 𐁬 𐁭 𐁮 𐁯 𐁰 𐁱 𐁲 𐁳 𐁴 𐁵 𐁶 𐁷 𐁸 𐁹 𐁺 𐁻 𐁼 𐁽 𐁾 𐁿 𐂀 𐂁 𐂂 𐂃 𐂄 𐂅 𐂆 𐂇 𐂈 𐂉 𐂊 𐂋 𐂌 𐂍 𐂎 𐂏 𐂐 𐂑 𐂒 𐂓 𐂔 𐂕 𐂖 𐂗 𐂘 𐂙 𐂚 𐂛 𐂜 𐂝 𐂞 𐂟 𐂠 𐂡 𐂢 𐂣 𐂤 𐂥 𐂦 𐂧 𐂨 𐂩 𐂪 𐂫 𐂬 𐂭 𐂮 𐂯 𐂰 𐂱 𐂲 𐂳 𐂴 𐂵 𐂶 𐂷 𐂸 𐂹 𐂺 𐂻 𐂼 𐂽 𐂾 𐂿 𐃀 𐃁 𐃂 𐃃 𐃄 𐃅 𐃆 𐃇 𐃈 𐃉 𐃊 𐃋 𐃌 𐃍 𐃎 𐃏 𐃐 𐃑 𐃒 𐃓 𐃔 𐃕 𐃖 𐃗 𐃘 𐃙 𐃚 𐃛 𐃜 𐃝 𐃞 𐃟 𐃠 𐃡 𐃢 𐃣 𐃤 𐃥 𐃦 𐃧 𐃨 𐃩 𐃪 𐃫 𐃬 𐃭 𐃮 𐃯 𐃰 𐃱 𐃲 𐃳 𐃴 𐃵 𐃶 𐃷 𐃸 𐃹 𐃺 𐃻 𐃼 𐃽 𐃾 𐃿 𐄀 𐄁 𐄂 𐄃 𐄄 𐄅 𐄆 𐄇 𐄈 𐄉 𐄊 𐄋 𐄌 𐄍 𐄎 𐄏 𐄐 𐄑 𐄒 𐄓 𐄔 𐄕 𐄖 𐄗 𐄘 𐄙 𐄚 𐄛 𐄜 𐄝 𐄞 𐄟 𐄠 𐄡 𐄢 𐄣 𐄤 𐄥 𐄦 𐄧 𐄨 𐄩 𐄪 𐄫 𐄬 𐄭 𐄮 𐄯 𐄰 𐄱 𐄲 𐄳 𐄴 𐄵 𐄶 𐄷 𐄸 𐄹 𐄺 𐄻 𐄼 𐄽 𐄾 𐄿 𐅀 𐅁 𐅂 𐅃 𐅄 𐅅 𐅆 𐅇 𐅈 𐅉 𐅊 𐅋 𐅌 𐅍 𐅎 𐅏 𐅐 𐅑 𐅒 𐅓 𐅔 𐅕 𐅖 𐅗 𐅘 𐅙 𐅚 𐅛 𐅜 𐅝 𐅞 𐅟 𐅠 𐅡 𐅢 𐅣 𐅤 𐅥 𐅦 𐅧 𐅨 𐅩 𐅪 𐅫 𐅬 𐅭 𐅮 𐅯 𐅰 𐅱 𐅲 𐅳 𐅴 𐅵 𐅶 𐅷 𐅸 𐅹 𐅺 𐅻 𐅼 𐅽 𐅾 𐅿 𐆀 𐆁 𐆂 𐆃 𐆄 𐆅 𐆆 𐆇 𐆈 𐆉 𐆊 𐆋 𐆌 𐆍 𐆎 𐆏 𐆐 𐆑 𐆒 𐆓 𐆔 𐆕 𐆖 𐆗 𐆘 𐆙 𐆚 𐆛 𐆜 𐆝 𐆞 𐆟 𐆠 𐆡 𐆢 𐆣 𐆤 𐆥 𐆦 𐆧 𐆨 𐆩 𐆪 𐆫 𐆬 𐆭 𐆮 𐆯 𐆰 𐆱 𐆲 𐆳 𐆴 𐆵 𐆶 𐆷 𐆸 𐆹 𐆺 𐆻 𐆼 𐆽 𐆾 𐆿 𐇀 𐇁 𐇂 𐇃 𐇄 𐇅 𐇆 𐇇 𐇈 𐇉 𐇊 𐇋 𐇌 𐇍 𐇎 𐇏 𐇐 𐇑 𐇒 𐇓 𐇔 𐇕 𐇖 𐇗 𐇘 𐇙 𐇚 𐇛 𐇜 𐇝 𐇞 𐇟 𐇠 𐇡 𐇢 𐇣 𐇤 𐇥 𐇦 𐇧 𐇨 𐇩 𐇪 𐇫 𐇬 𐇭 𐇮 𐇯 𐇰 𐇱 𐇲 𐇳 𐇴 𐇵 𐇶 𐇷 𐇸 𐇹 𐇺 𐇻 𐇼 𐇽 𐇾 𐇿 𐈀 𐈁 𐈂 𐈃 𐈄 𐈅 𐈆 𐈇 𐈈 𐈉 𐈊 𐈋 𐈌 𐈍 𐈎 𐈏 𐈐 𐈑 𐈒 𐈓 𐈔 𐈕 𐈖 𐈗 𐈘 𐈙 𐈚 𐈛 𐈜 𐈝 𐈞 𐈟 𐈠 𐈡 𐈢 𐈣 𐈤 𐈥 𐈦 𐈧 𐈨 𐈩 𐈪 𐈫 𐈬 𐈭 𐈮 𐈯 𐈰 𐈱 𐈲 𐈳 𐈴 𐈵 𐈶 𐈷 𐈸 𐈹 𐈺 𐈻 𐈼 𐈽 𐈾 𐈿 𐉀 𐉁 𐉂 𐉃 𐉄 𐉅 𐉆 𐉇 𐉈 𐉉 𐉊 𐉋 𐉌 𐉍 𐉎 𐉏 𐉐 𐉑 𐉒 𐉓 𐉔 𐉕 𐉖 𐉗 𐉘 𐉙 𐉚 𐉛 𐉜 𐉝 𐉞 𐉟 𐉠 𐉡 𐉢 𐉣 𐉤 𐉥 𐉦 𐉧 𐉨 𐉩 𐉪 𐉫 𐉬 𐉭 𐉮 𐉯 𐉰 𐉱 𐉲 𐉳 𐉴 𐉵 𐉶 𐉷 𐉸 𐉹 𐉺 𐉻 𐉼 𐉽 𐉾 𐉿 𐊀 𐊁 𐊂 𐊃 𐊄 𐊅 𐊆 𐊇 𐊈 𐊉 𐊊 𐊋 𐊌 𐊍 𐊎 𐊏 𐊐 𐊑 𐊒 𐊓 𐊔 𐊕 𐊖 𐊗 𐊘 𐊙 𐊚 𐊛 𐊜 𐊝 𐊞 𐊟 𐊠 𐊡 𐊢 𐊣 𐊤 𐊥 𐊦 𐊧 𐊨 𐊩 𐊪 𐊫 𐊬 𐊭 𐊮 𐊯 𐊰 𐊱 𐊲 𐊳 𐊴 𐊵 𐊶 𐊷 𐊸 𐊹 𐊺 𐊻 𐊼 𐊽 𐊾 𐊿 𐋀 𐋁 𐋂 𐋃 𐋄 𐋅 𐋆 𐋇 𐋈 𐋉 𐋊 𐋋 𐋌 𐋍 𐋎 𐋏 𐋐 𐋑 𐋒 𐋓 𐋔 𐋕 𐋖 𐋗 𐋘 𐋙 𐋚 𐋛 𐋜 𐋝 𐋞 𐋟 𐋠 𐋡 𐋢 𐋣 𐋤 𐋥 𐋦 𐋧 𐋨 𐋩 𐋪 𐋫 𐋬 𐋭 𐋮 𐋯 𐋰 𐋱 𐋲 𐋳 𐋴 𐋵 𐋶 𐋷 𐋸 𐋹 𐋺 𐋻 𐋼 𐋽 𐋾 𐋿 𐌀 𐌁 𐌂 𐌃 𐌄 𐌅 𐌆 𐌇 𐌈 𐌉 𐌊 𐌋 𐌌 𐌍 𐌎 𐌏 𐌐 𐌑 𐌒 𐌓 𐌔 𐌕 𐌖 𐌗 𐌘 𐌙 𐌚 𐌛 𐌜 𐌝 𐌞 𐌟 𐌠 𐌡 𐌢 𐌣 𐌤 𐌥 𐌦 𐌧 𐌨 𐌩 𐌪 𐌫 𐌬 𐌭 𐌮 𐌯 𐌰 𐌱

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (al-Qur'an, An-nisa 59).

Dalam **Gusfahmi**, ada dua ulama yang memberikan definisi tentang pajak diantaranya:

1. Yusuf Qardhawi mengatakan

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum disatu pihak dan merealisasi untuk tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan lain yang ingin dicapai Negara **(2007:32)**.

2. Zallum berpendapat

Pajak adalah harta yang diwajibkan allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta **(2007:23)**.

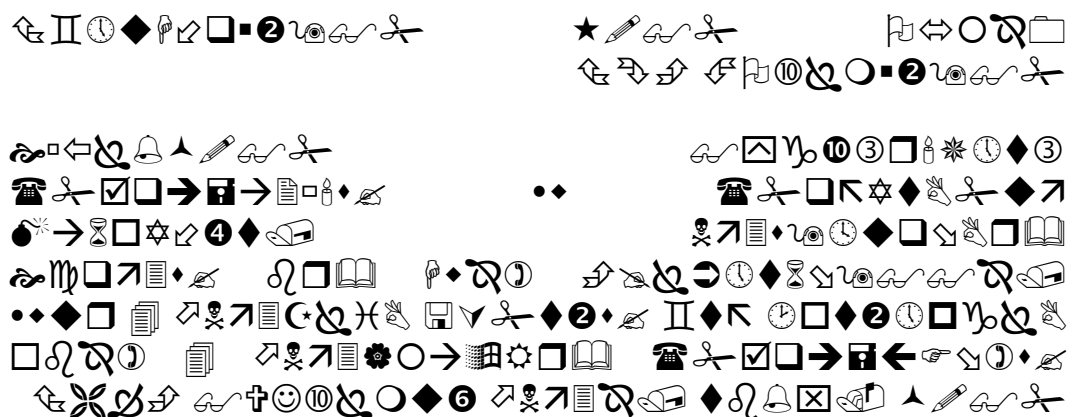
2.8. Pajak dan Zakat

Secara bahasa zakat berarti tumbuh, bersih, berkembang dan berkah. Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Sedangkan menurut *terminology* Syari'ah zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu.

Tujuan pajak antara lain untuk penyediaan fasilitas umum dan kesejahteraan masyarakat. Ironisnya, besarnya pungutan pajak, ternyata tak berpengaruh apapun terhadap kehidupan masyarakat. Penerimaan pajak dari tahun

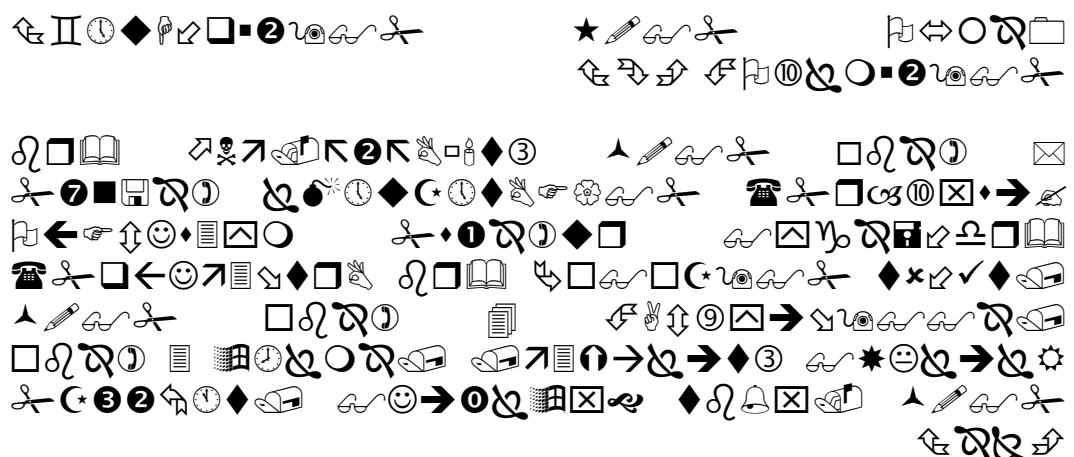
ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Namun, ironisnya kondisi jalan, transportasi dan fasilitas umum tetap rusak terbengkalai, fakir miskin pun bukannya semakin berkurang bahkan semakin bertambah.

Allah berfirman:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(al-qur'an 29).

Dalam ayat lain juga dijelaskan :



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Dengan kondisi saat ini, wajar apabila kesadaran pajak masyarakat Indonesia sangat rendah. Indikasinya adalah tax ratio yang hanya 13,6% dari PDB, dibawah rata-rata tax ratio negara-negara Eropa dan Amerika yaitu 33%. Karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara (78% APBN berasal dari pajak) tidak heran jika pemerintah terus-menerus melakukan usaha memperbesar perolehan pajak.

Di Indonesia, seorang muzaki (wajib zakat) adalah juga wajib pajak. Atas dasar ini tentu saja umat Islam lebih rela membayar zakat dari pada pajak. Meskipun zakat itu masih ditunaikan secara tradisional, dibayarkan langsung kepada penerima, Islam mengakui bahwa pajak merupakan kewajiban setiap warga negara. Sebagai warga negara, seorang muslim wajib taat kepada pemerintah (ulil amri). Hanya memang perlu dikaji apakah pajak yang diterapkan sekarang telah sesuai dengan ketentuan pajak secara syariah.

Dualisme kewajiban pajak dan zakat tersebut telah dikompromikan dengan Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, dengan mengakui zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sayangnya, karena zakat hanya diakui

sebagai biaya, maka dampak bagi kewajiban pajak masih relatif kecil. Sehingga regulasi tersebut belum cukup efektif untuk meningkatkan pajak maupun zakat. Lain halnya jika pembayaran zakat mengurangi kewajiban pajak.

Meskipun pajak dan zakat memiliki titik singgung yang sama, yaitu kewajiban yang mengikat, dan kekuasaan yang menekan, namun di antara keduanya terdapat perbedaan penting, yaitu:

1. Bahwa zakat itu adalah ibadah, dan pajak adalah kewajiban kepada negara.
2. Penetapan nishab dan persentase zakat ditetapkan oleh syariat, maka hukumnya tetap dan tidak berubah. Sedangkan pajak ditetapkan oleh ulil amri, maka merekalah yang menentukan dan menghapuskan.
3. Pajak berhubungan antara warga dan negara. Sedangkan zakat adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Seorang muzakki akan membayar zakatnya, meskipun tidak ada yang menagihnya.
4. Pajak terbatas sasarannya, hanya pada target materi; sedangkan zakat memiliki sasaran ruhiyah, akhlak, dan insaniyah (kemanusiaan). Zakat adalah ibadah yang sekaligus pungutan.

2.8.1 Persentase Progresif antara Pajak dan Zakat

Pajak dengan persentase tetap ialah yang telah ditetapkan persentasenya dengan satu ketentuan, meskipun kekayaan bertambah banyak. Sedangkan pajak progresif semakin besar persentasenya sesuai dengan pertambahan kekayaan,

seperti 10% untuk ribuan pertama, 12% untuk ribuan kedua, 14% untuk ribuan ketiga, dan seterusnya.

Dan yang terkenal dalam zakat adalah persentase tetap, tidak dengan persentase progresif, meskipun kekayaan yang dikeluarkan zakatnya semakin besar. Untuk uang misalnya, persentase zakatnya 2,5% baik bagi yang memiliki uang yang mencapai nishab ataupun yang memiliki seribu kali nishab. Apa hikmah di balik itu?

1. Tujuan pajak progresif adalah untuk mengembalikan keseimbangan dan mendekatkan kesenjangan. Tujuan ini sangat serius diwujudkan dalam Islam, tetapi dengan cara di luar zakat. Sistem waris (harta pusaka), wasiat, larangan riba, larangan penimbunan, dan larangan cara-cara haram lainnya, adalah upaya untuk mewujudkan tujuan di atas
2. Zakat yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin, memiliki peran besar dalam mewujudkan tujuan di atas. Pada saat pajak progresif diambil dari seluruh lapisan dan terkadang dari fakir miskin pula, kemudian digunakan untuk belanja negara secara umum yang dimanfaatkan oleh orang kaya juga.
3. Zakat sebagai ibadah harus ditetapkan dengan baku dan tidak berubah-ubah. Hal ini tidak menghalangi negara ketika membutuhkan untuk menetapkan pajak selain zakat. Ulil amri dapat memetakan kemaslahatan yang digunakan untuk menetapkan pajak progresif

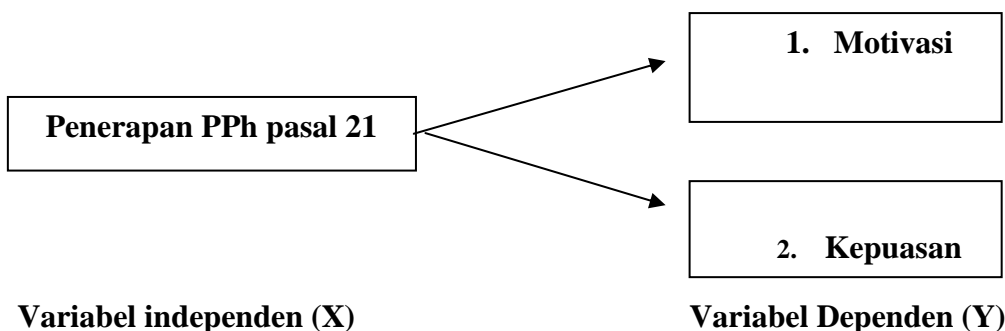
dalam kondisi tertentu. Sedangkan zakat tidak membuka peluang intervensi pendapat dan penyesuaian. Zakat dan Pajak, 2008.
<http://www.dakwatuna.com/2008/zakat-dan-pajak/>

Kerangka Skematis Model Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka bisa dibuat suatu rerangka teoritis yang dapat digambarkan dalam bentuk diagram skematik pada gambar berikut :

Gambar II.3

Skema Model Penelitian



2.9 Pengembangan Hipotesis

Fungsi pajak pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend* (Nurmantussafri, 2005:15). Dari pelaksanaan upeti pada zaman kerajaan, menunjukkan dengan jelas bahwa sejak dahulu kala negara telah mengandalkan pemasukan dana yang dipungut dari anggota masyarakat untuk menutup berbagai keperluan negara yang lebih dikenal sebagai fungsi *budgeter*. Sedang fungsi *regulerend* adalah fungsi perpajak untuk mengatur tercapainya keseimbangan perekonomian politik suatu negara. Dengan semakin besarnya peran pajak dalam pembiayaan keperluan Negara, menempatkan wajib pajak pada posisi tawar menawar (*bargaining position*) yang

kuat. Semakin besar kontribusi masyarakat dalam membiayai pengeluaran negara, semakin tinggi pula hak kontrol masyarakat terhadap kebijaksanaan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat.

Pengaruh motivasi terhadap perilaku secara teoritis dapat dibahas melalui kajian struktur (*content theory*), dan kajian proses (*process theory*). *Content theory* menitikberatkan kepada faktor-faktor yang melekat pada individu yang dapat menimbulkan, mengarahkan, mempertahankan, dan menghentikan perilaku. *Process theory*, menjelaskan dan menganalisa bagaimana perilaku dimunculkan, diarahkan, dipertahankan dan dihentikan.

Dari pembahasan *content theory*, kepatuhan wajib pajak sangat terkait dengan kepentingan atau kebutuhan yang harus terpenuhi, kebutuhan wajib pajak adalah menghitung besarnya pajak yang pantas. Pajak yang pantas adalah besarnya pajak yang secara yuridis tidak melanggar peraturan perpajakan dan secara ekonomis tidak memberatkan keuangan wajib pajak.

Dari kepuasan *process theory*, perilaku patuh dalam membayar pajak dapat didorong dengan menciptakan peraturan yang dapat mengakomodasi dan mendinamisasi ; sanksi dan insertif (*reinforcement theory*), harapan (*expectancy theory*), rasa keadilan (*equity theory*), dan tujuan (*goal setting theory*) yang terkait dengan kebijakan perpajakan. *Pengaruh Teori Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, April, 2008. <http://social-pajak.blogspot.com/2008/04/pengaruh-teori-motivasi-terhadap.html>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner dengan daftar pertanyaan berupa penerapan PPh pasal 21 terhadap motivasi, penerapan PPh pasal 21 terhadap kepuasan pegawai tetap dalam membayar pajak. Dalam penelitian ini penulis menghubungkan PPh pasal 21 terhadap motivasi pegawai tetap dalam membayar pajak, dan terhadap kepuasan pegawai tetap dalam membayar pajak.

Jika publik menilai kontribusi yang diberikan dari pajak itu sendiri dirasakan baik dan dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, maka akan menimbulkan motivasi yang baik dalam membayar pajak, maka semakin tinggi pula tingkat wajib pajak yang mematuhi pembayaran pajak. Karna kontribusi yang sesuai dengan yang diharapkan dari penerapan PPh pasal 21 itu sendiri. Sehingga pemerintah mendapatkan pendapatan yang jauh lebih besar dari tahun sebelumnya. Jika kontribusi yang didapat kurang baik atau buruk, dan kesejahteraan masyarakat tidak tercukupi, maka motivasi yang timbul dinilai buruk, maka semakin rendah tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga pemerintah akan kekurangan pendanaan dalam APBN.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H_1 : Penerapan PPh pasal 21 yang baik berpengaruh signifikan terhadap motivasi pegawai tetap dalam membayar pajak.

Selain itu, dengan adanya penerapan PPh pasal 21 akan secara langsung berimplikasi terhadap kepuasan pegawai tetap dalam membayar pajak. Semakin baik penerapan PPh pasal 21 yang diterapkan dari pemotongan penghasilan untuk

kesejahteraan yang baik, maka semakin baik pula kepuasan pegawai tetap yang dirasakan dalam membayar pajak. Sehingga wajib pajak merasa tidak dirugikan dengan adanya pemotongan gaji mereka. Jika penerapan PPh pasal 21 dirasa buruk ataupun kurang baik, maka kepuasan yang dirasakan wajib pajak dalam membayar pajak akan berkurang.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_2 : Penerapan PPh pasal 21 yang baik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pegawai tetap dalam membayar pajak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Sifat dan Lokasi Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat survey, dimana peneliti langsung turun kelapangan untuk mengumpulkan data. Survey ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang diantar langsung keperusahaan yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan dikota pekanbaru yaitu pada perusahaan PT. Riau Muda Jasa Sarana. Lokasi dipilih berdasarkan pertimbangan kemampuan penulis dalam memperoleh data untuk keperluan penelitian yang dapat diandalkan tingkat akurasi.

3.2. Populasi dan Sample Penelitian.

Populasi merupakan jumlah keseluruhan elemen yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagai anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu, sehingga dapat mewakili dari suatu populasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah PT. Riau Muda Jasa Sarana. Sedangkan yang menjadi sampel penelitian ini adalah pegawai tetap PT. Riau Muda Jasa Sarana. Teknik sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Sensus* yaitu seluruh pegawai yang telah memiliki NPWP sebagai sampel yang ada diperusahaan tempat meneliti.

3.3 Jenis dan Sumber Data.

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perorangan (Umar, 1999:84). Dimana data primer ini bisa berwujud hasil wawancara ataupun pengisian kuesioner. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner sebagai sumber data. Kuesioner yang disebarkan dengan 20 daftar pertanyaan untuk penerapan PPh pasal 21, 20 daftar pertanyaan untuk motivasi, dan 20 daftar pertanyaan untuk kepuasan dalam membayar pajak, diantara daftar pertanyaan tersebut berupa:

1. Pengaruh penerapan PPh 21 dalam membayar pajak.
2. Pengaruh penerapan PPh 21 terhadap motivasi pegawai tetap dalam membayar pajak.
3. Pengaruh penerapan PPh 21 terhadap kepuasan pegawai tetap dalam membayar pajak.

3.4 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat).

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen penelitian atau variabel terikat adalah motivasi pegawai tetap dalam membayar pajak dan kepuasan pegawai tetap dalam membayar pajak.

- a. Motivasi Pegawai Tetap Dalam Membayar Pajak

Motivasi adalah dorongan psikologis yang mengarahkan seseorang ke arah suatu tujuan. Motivasi membuat keadaan dalam diri individu muncul, terarah, dan mempertahankan perilaku, menurut Kartini Kartono motivasi menjadi dorongan (*driving force*) terhadap seseorang agar mau melaksanakan sesuatu.

Motivasi yang ada pada setiap orang tidaklah sama, berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Untuk itu, diperlukan pengetahuan mengenai pengertian dan hakikat motivasi, serta kemampuan teknik menciptakan situasi sehingga menimbulkan motivasi atau dorongan bagi mereka untuk berbuat atau berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh individu lain atau organisasi.

Indah dalam penelitiannya tentang motivasi dan kepuasan pegawai menggunakan metode *Job Diagnostic Survey* (JDS) dan *Minnesota Satisfaction Questionnaire* (MSQ). Kedua metode ini merupakan hasil pengembangan teori motivasi isi (*content theory*) yang mempunyai perbedaan dalam cara pengukurannya. Motivasi dihitung dengan MPS (*Motivation Potential Score*).

b. Kepuasan Pegawai Tetap Dalam Membayar Pajak

Indah yang juga dalam penelitiannya tentang kepuasan pegawai menggunakan metode *Minnesota Satisfaction Questionnaire* (MSQ). Menempatkan kepuasan sebagai variabel terikat merupakan hal yang dimana pengukuran tingkat kepuasan dalam membayar pajak dihitung dengan prosentase tingkat kepuasan kerja metode *Minnesota Satisfaction Questionnaire* (MSQ).

Karena dalam penelitian ini mengukur motivasi dan kepuasan pegawai dalam bekerja. Maka peneliti disini dalam pengukurannya hanya menggunakan kuesioner, untuk mengukur motivasi pegawai tetap dalam membayar pajak yang disingkat dengan MO dan kepuasan pegawai tetap dalam membayar pajak yang disingkat dengan KP.

3.4.2. Variabel Independen

Variabel independen penelitian ini atau variabel bebas adalah PPh pasal 21. Biasanya variabel ini diukur dengan menggunakan tarif yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal pajak nomor: 15 /PJ/ 2006, dengan tarif sebagai berikut:

Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Contoh penghitungan atau pengukuran PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap dengan gaji bulanan.

Donny bekerja pada perusahaan PT. Mutiara Raya dengan memperoleh gaji sebulan Rp. 3.000.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000. donny menikah dan memiliki anak sebanyak 3 orang .

Gaji sebulan	Rp. 3.000.000
Pengurangan:	
Biaya jabatan 5% x Rp. 2.500.000	Rp. 125.000
Iuran pensiun	<u>Rp. 100.000</u>
Jumlah pengurangan	<u>Rp. 225.000</u>
Penghasilan netto sebulan	Rp. 2.775.000
Penghasilan netto setahun Rp. 2.775.000 x 12	Rp. 33.300.000

PTKP(penghasilan tidak kena pajak) setahun	
- untuk WP sendiri	RP.13.200.000
- untuk WP kawin	Rp. 1.200.000
- untuk 3 anak (Rp. 1.200.000 x 3)	<u>Rp. 3.600.000</u>
	<u>Rp.18.000.000</u>

Penghasilan kena pajak setahun Rp.51.300.000

PPh pasal 21 setahun
 $5\% \times 50.000.000 = \text{Rp.}2.500.000$
 $15\% \times 1.300.000 = \text{Rp. } 195.000$
Rp.2.950.000

PPh pasal 21 atas gaji sebulan Tn. Donny Rp. 2.950.000 : 12 Rp. 224.580

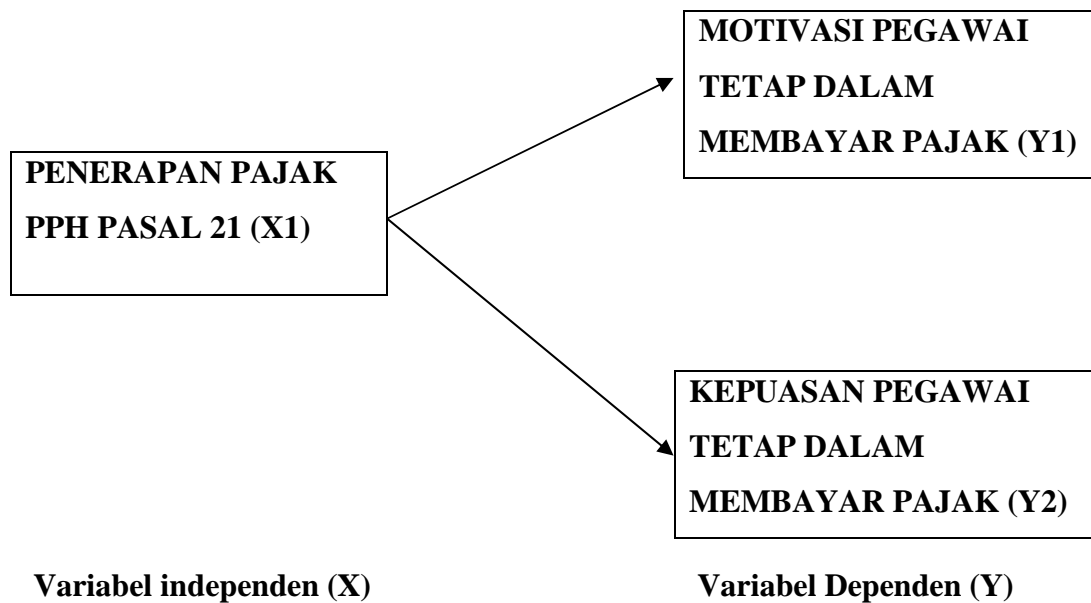
3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu dengan mengajukan kuesioner kepada responden dalam hal ini adalah pegawai tetap perusahaan yang diteliti, yaitu mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari penerapan PPh pasal 21 terhadap motivasi dan kepuasan pegawai tetap dalam membayar pajak.

Menurut tingkat eksplanasinya, penelitian ini bersifat asosiatif atau hubungan. Hubungan yang terdapat dalam penelitian ini adalah hubungan yang bersifat kausal atau sebab akibat. Skala instrument untuk menyusun kuesioner peneliti menggunakan **skala likert**, skala ini berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu. misalnya adalah dari setuju sampai tidak setuju, senang sampai tidak senang .

3.6. Model Penelitian

Dari penelitian ini dibentuklah suatu model untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, model penelitian yang penulis gunakan:

Gambar III.1**Model Penelitian**

Dimana jika diuraikan, apakah penerapan pemotongan pajak PPh pasal 21 sebagai variabel independen atau variabel bebas (X) memiliki hubungan pengaruh terhadap motivasi pegawai tetap dalam membayar pajak (Y1), dan apakah kepuasan pegawai tetap dalam membayar pajak juga dapat dipengaruhi oleh penerapan PPh pasal 21(Y2), dimana motivasi dan kepuasan pada model penelitian sebagai variabel dependen atau variabel terikat .

3.6.1 Indikator Yang Mempengaruhi Masing-Masing Variabel

Tabel III.1 Indikator Yang Mempengaruhi Variabel Independen

variabel	Indikator yang mempengaruhi
Penerapan Pajak PPh pasal 21	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan penyumbang kas Negara terbesar. 2. Pajak merupakan iuran wajib. 3. Negara Indonesia merupakan Negara hukum. 4. Negara Indonesia mempunyai kewajiban terhadap rakyat. 5. pajak yang dikenakan harus sesuai dengan tarif yang dikenakan 6. Kebutuhan atau tingkatan setiap manusia berbeda 7. Manusia ingin diberlakukan adil 8. Keadilan horizontal

Tabel III.2 Indikator Yang Mempengaruhi Variabel Dependen

Variabel	Indikator yang mempengaruhi
Motivasi dalam membayar pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak bersifat paksaan. 2. Saksi hukum. 3. Harapan hasil yang didapatkan (kontribusi dari pajak) 4. Ingin berpartisipasi 5. Kebanggaan 6. Hubungan manusiawi 7. lingkungan sekitar wajib pajak
Kepuasan dalam membayar pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imbalan (kontribusi pajak) yang didapat sesuai dengan yang diharapkan. 2. Apabila imbalan yang dicapai lebih besar dari standar yang ditetapkan. 3. Apabila Manusia diberlakukan adil. 4. Jika pajak yang dikenakan kecil. 5. Prosedur yang mudah dalam membayar.

3.7. Metode Analisis Data

3.7.1. Uji Kualitas Data

Dalam proses penelitian, salah satu hal penting yang diperlu dilakukan dalam menghimpun pendapat melalui daftar pertanyaan berupa angket, adalah uji instrument atau alat ukur. Ada dua alat penting yang berlaku pada sebuah

angket, yaitu Validitas dan Reliabilitas. Pengujian Validitas dan Reliabilitas adalah proses menguji butir-butir pertanyaan yang ada dalam sebuah angket, apakah isi dari butir-butir pertanyaan tersebut Valid dan Reliable.

Instrument yang Valid berarti alat ukur mendapatkan data dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan instrument yang Reliabel berarti instrument tersebut bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Jadi instrument yang Valid dan Reliabel merupakan syarat utama untuk mendapatkan hasil penelitian yang Valid dan Reliabel.

Namun perlu dipahami bahwa tidak otomatis dengan menggunakan instrument yang telah di Uji Validitas dan Reliabilitasnya, hasil data penelitian menjadi Valid dan Reliabel. Hal ini masih dipengaruhi kondisi objek yang diteliti, dan kemampuan orang yang menggunakan instrument (**Sugiyono: 98**). Oleh karna itu, peneliti harus mampu mengendalikan objek yang diteliti dan meningkatkan kemampuan dalam menggunakan instrument untuk mengukur variabel yang diteliti.

Dalam sebuah penelitian, data yang diperoleh harus diuji terlebih dahulu sebelum memasuki proses analisis. Pengujian data yang dilakukan meliputi pengujian Validitas dan pengujian Reliabilitas.

1. Uji Validitas.

Pengujian Validitas adalah sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu alat ukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumens tersebut menjalankan fungsi

ukurnya dan memberikan hasil yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Validitas dilakukan dengan korelasi *Devariate* antar masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk.

Suatu item kuesioner dapat dikatakan Valid jika *Corrected item-Total Correlation* memiliki nilai kritis $>$ dari 0,3 atau 30%. Dengan demikian maka item yang memiliki korelasi $>$ 30% dikategorikan Valid, sedangkan item yang memiliki korelasi $<$ 30% dikategorikan tidak Valid dan akan disisihkan dari analisa selanjutnya.

Jenis Validitas yang digunakan yaitu jenis Validitas isi, dimana Validitas isi yaitu untuk mengukur sejauh mana isi alat ukur (kuisisioner) tersebut mewakili semua aspek yang dianggap sebagai aspek kerangka konsep.

2. Uji Reliabilitas.

Pengujian Reliabilitas adalah pengujian yang menunjukkan sejauh mana pengukuran itu dapat memberikan hasil yang relative sama atau tidak berbeda, bila dilakukan pengulangan pengukuran terhadap objek yang sama. Perhitungan reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik *Croanbach Alpha* melalui SPSS. Suatu instrument dikatakan andal atau reliabel memberi nilai alpha $>$ 0,60.

Berhubung gejala sosial tidak semantap gejala fisik, maka dalam pengukuran gejala sosial unsur kesalahan pengukuran (*Measurement Error*) selalu diperhitungkan dalam riset sosial.

3.7.2. Uji Normalitas.

Uji Normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam Uji

Normalitas ini ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (**Ghozali, 2007**). Karena analisis grafik dapat menyesatkan, karena kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu pada penelitian ini untuk melakukan uji normalitas data digunakan *Uji Kolgomorov-Smirnov (K-S)*.

3.7.3. Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif ini akan mengemukakan cara-cara penyajian data dengan berbagai bentuk, baik tabel maupun grafik. Penyajian data yang berupa tabel, grafik, tersebut dapat disajikan dengan metode biasa atau dengan metode interaktif. Penyajian data disertai penjelasan kelompok melalui modus, median, dan mean dan variasi kelompok menggunakan rentang dan simpangan baku.

3.7.4. Uji Asumsi Klasik

Setelah dilakukan uji normalitas untuk mengetahui distribusi data penelitian, selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik sebelum menguji hipotesis. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari

autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson, dimana hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai Durbin-Watson. Kriteria yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson adalah (Al-Ghozali; 2007)

DW	KESIMPULAN
$0 < d < dl$	Ada autokorelasi positif
$dl \leq d \leq du$	Tanpa kesimpulan
$du < d < 4 - du$	Tidak ada autokorelasi
$4 - du \leq d \leq 4 - dl$	Tanpa kesimpulan
$4 - dl < d < 4$	Ada autokorelasi negatif

b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak konstan pada regresi sehingga akurasi hasil prediksi menjadi meragukan. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu observasi ke observasi yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut *homoskedastisitas*, dan jika berbeda disebut *heteroskedastisitas*. Heteroskedastisitas menggambarkan nilai hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *studentized delete residual* nilai tersebut. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada satu model dapat dilihat dari pola gambar Scatterplot model. Analisis pada gambar *Scatterplot* yang menyatakan model regresi linier berganda tidak terdapat heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Selain itu untuk mendukung hasil analisis grafik, pada penelitian ini juga digunakan Uji *Glejser* untuk menguji gejala heteroskedastisitas, Yaitu nilai *absolute* residual diregresikan pada tiap-tiap variabel independen. Masalah heteroskedastisitas terjadi jika ada variabel yang secara statistik signifikan (signifikansi < 0.05).

3.7.5 Pengujian Hipotesis

Setelah memenuhi uji asumsi klasik, maka tahap pengujian selanjutnya adalah pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Analisis regresi ini bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (**Ghozali, 2007:82**). Variabel dependen diasumsikan random/stokastik, yang berarti mempunyai distribusi *probabilistik*, sedangkan variabel independen diasumsikan memiliki nilai tetap. Persamaan regresi sederhana akan dipakai untuk menguji hipotesis yang telah dibangun dalam penelitian ini.

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Untuk menguji hipotesis pertama pada penelitian ini digunakan persamaan regresi sederhana, sbb :

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

H_{01} : Penerapan PPh pasal 21 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi pegawai tetap dalam membayar pajak.

H_{a1} : Penerapan PPh pasal 21 berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi pegawai tetap dalam membayar pajak.

Kriteria pengujian yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis (H_{a1}) di atas adalah: jika koefisien regresi b_1 memiliki nilai $p\text{-value} < 0.05$ maka H_{a1} diterima yang berarti, Penerapan PPh pasal 21 berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi dalam membayar pajak

b. Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan menggunakan persamaan regresi sederhana, sbb :

$$Y = \alpha + \beta_2 X + \varepsilon \dots\dots\dots(2)$$

Dimana kriteria penilaiannya adalah :

H_{02} : Penerapan PPh pasal 21 tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dalam membayar pajak

H_{a2} : Penerapan PPh pasal 21 berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dalam membayar pajak.

Kriteria pengujian yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis (H_{a2}) di atas adalah: Jika koefisien regresi b_2 memiliki nilai $p\text{-value} < 0.05$ maka H_{a2} diterima yang berarti, Penerapan PPh pasal 21 berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pegawai tetap dalam membayar pajak.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pembahasan bab ini meliputi hasil penelitian untuk mengukur variabel dependen penerapan PPh pasal 21 atas variabel independen yaitu motivasi dan kepuasan pegawai tetap dalam membayar pajak, Hasil penelitian ini meliputi gambaran umum responden, pengujian dengan lima alat uji yaitu: Kualitas Data, Normalitas, Statistik Deskriptif, Asumsi Klasik, dan Pengujian Hipotesis.

4.1 Gambaran Umum Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah PT. Riau Muda Jasa Sarana Pekanbaru. Berdasarkan metode sensus maka sampel perusahaan adalah menyangkut semua populasi yang telah memiliki NPWP. Dalam penelitian ini penulis mengambil 32 sampel yang telah memiliki NPWP.

Penyebaran kuesioner untuk perusahaan ini dilakukan langsung, maksudnya disini peneliti mendatangi langsung perusahaan yang akan diteliti, mulai pada tanggal 1 Juni 2009 sebanyak 32 kuesioner yang disebarkan langsung pada pegawai tetap PT. Riau Muda Jasa Sarana, diharapkan setelah 3 hari setelah kuesioner disebarkan akan dikembalikan yaitu sekitar tanggal 3 Juni 2009. Dari 32 sampel yang disebarkan, ada 30 kuesioner yang dikembalikan oleh perusahaan, berarti ada sekitar 2 kuesioner yang tidak dikembalikan dan dianggap hilang oleh perusahaan tersebut.

4.2 Kualitas Data

a. Reliabilitas (Uji *Cronbach Alpha/ One Shot*)

Uji Reliabilitas dilakukan dengan uji *cronbach alpha/ one shot* menggunakan SPSS versi 16. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 (Nunnally, 2005:42). Hasil uji Reliabilitas disajikan sebagai berikut:

Tabel IV.1 Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha Based On Standardized	Kriteria	Keterangan
Motivasi	0,820	0,60	Reliabel
Kepuasan	0,780	0,60	Reliabel

Sumber : Data Olahan Primer versi 16, lampiran 3

Pada tabel IV.2 terlihat bahwa variabel motivasi mempunyai nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,820, variabel kepuasan mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,780. berdasarkan kriteria Nannally, semua pertanyaan tentang variabel motivasi, dan variabel kepuasan, dikatakan reliabilitas dan layak digunakan sebagai data penelitian karena nilai *Cronbach's Alpha Responsibility* diatas 60% atau 0,06.

b. Validitas (*Korelasi Bivariate*)

Dalam pengujian yang dilakukan oleh peneliti untuk menghasilkan kualitas data, layak atau tidaknya suatu data yang dapat diangkat maka peneliti mengaitkan data faktor dengan metode validitas yaitu melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel, masing-masing butir pertanyaan dapat dilihat kevalitan dari *Corrected Item-Total Correlation* memiliki nilai kritis > dari 0,3 atau 30%. Dengan demikian maka item yang

memiliki korelasi $> 30\%$ dikategorikan valid, sedangkan item yang memiliki korelasi $< 30\%$ dikategorikan tidak valid dan akan disisihkan dari analisis selanjutnya. Untuk variabel pengaruh penerapan PPh pasal 21 dapat disajikan sebagai berikut:

b.1 Validitas Variabel Motivasi

Tabel IV.2 Rekapitulasi Uji Validitas Variabel Motivasi

Butir Pertanyaan	Corrected Item-Total Correlation	Kriteria	Keterangan
1	0.391	0,03	Valid
2	0.487	0,03	Valid
3	0.376	0,03	Valid
4	0.371	0,03	Valid
5	0.364	0,03	Valid
6	0.368	0,03	Valid
7	0.388	0,03	Valid
8	0.358	0,03	Valid
9	0.282	0,03	Valid
10	0.435	0,03	Valid
11	0.569	0,03	Valid
12	0.315	0,03	Valid
13	0.355	0,03	Valid
14	0.318	0,03	Valid
15	0.343	0,03	Valid
16	0.502	0,03	Valid
17	0.344	0,03	Valid
18	0.400	0,03	Valid
19	0.408	0,03	Valid
20	0.339	0,03	Valid

Sumber : Data Olahan Primer versi 16, lampiran 1

Dari tabel IV.3 terlihat bahwa masing-masing butir pertanyaan variabel motivasi di atas kriteria 0,03 , maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik masing-masing indikator pertanyaan untuk variabel motivasi dalam membayar pajak adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

b.2 Validitas Variabel Kepuasan

Tabel IV.3 Rekapitulasi Uji Validitas Variabel Kepuasan

Butir Pertanyaan	Corrected Item-Total Correlation	Kriteria	Keterangan
1	0.315	0,03	Valid
2	0.353	0,03	Valid
3	0.33	0,03	Valid
4	0.338	0,03	Valid
5	0.325	0,03	Valid
6	0.386	0,03	Valid
7	0.323	0,03	Valid
8	0.333	0,03	Valid
9	0.338	0,03	Valid
10	0.376	0,03	Valid
11	0.361	0,03	Valid
12	0.316	0,03	Valid
13	0.307	0,03	Valid
14	0.373	0,03	Valid
15	0.322	0,03	Valid
16	0.349	0,03	Valid
17	0.355	0,03	Valid
18	0.378	0,03	Valid
19	0.318	0,03	Valid
20	0.309	0,03	Valid

Sumber: Data Olahan Primer versi 16, lampiran 2

Dari tabel IV.4 diatas terlihat bahwa masing-masing butir pertanyaan variabel kepuasan dalam membayar pajak diatas kriteria 0,03, maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik masing-masing indikator pertanyaan untuk variabel kepuasan dalam membayar pajak adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

4.3 Uji Statistik Deskriptif

Pada bagian ini akan digambarkan atau dideskripsikan dari data masing-masing variabel yang telah diolah dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, dan minimum dari masing-masing variabel.

Tabel IV.4 **Deskriptif Variabel Penelitian**
Descriptive Statistics

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kepuasan	30	38	59	48,47	5,764
Motivasi	30	36	62	45,93	6,602
Penerapan PPh Pasal 21	30	30	63	46,03	7,453
Valid N (listwise)	30				

Sumber: Olahan Data Primer versi 16, lampiran 5

Berdasarkan tabel IV.5 dapat diketahui bahwa *statistic deskriptif* dari masing-masing variabel. Dari 30 sampel dapat dilihat bahwa *PPh pasal 21* memiliki nilai terkecil sebesar 30 dan nilai terbesar sebesar 63 dengan nilai rata-rata sebesar 46,03 dan standar deviasinya adalah 7,453. Variabel Motivasi dari 30 sampel dalam penelitian ini memiliki nilai terkecil sebesar 36 dan yang terbesar sebesar 62 dengan rata-rata sebesar 45,93 dan standar deviasi sebesar 6,602. Sedangkan variabel kepuasan dari 30 sampel dengan nilai terkecil 38 dan nilai terbesar 59 dengan rata-rata 48,47 dan standar deviasi sebesar 5,764.

4.4 Normalitas (*Uji Kolmogorov-Smirnov*)

Uji Normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam Uji Normalitas ini ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (**Ghozali, 2007**). Karena analisis grafik dapat menyesatkan, karena kalau tidak hati-hati secara

visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu pada penelitian ini untuk melakukan uji normalitas data digunakan *Uji Kolgomorov-Smirnov* (K-S). Hasil uji K-S dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.5 Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas Variabel Penelitian

Variabel	Nilai K-S	Sig. (2-tailed)	Kriteria	Kesimpulan
Motivasi	1,043	0,226	0,05	Normal
Kepuasan	0,678	0,748	0,05	Normal

Sumber: Data Olahan Primer versi 16, lampiran 7

Dari tabel IV.1 diatas dapat dilihat hasil uji K-S pada penelitian ini dimana signifikansi dari masing-masing regresi dalam penelitian ini adalah 0,226 untuk motivasi sebagai variabel dependen, 0,748 untuk kepuasan sebagai variabel dependen. Hal ini membuktikan bahwa data terdistribusi secara normal atau mendekati normal karena signifikansi lebih besar dari 0.05 ($\alpha = 5\%$), artinya kedua persamaan regresi pada penelitian ini secara statistik terdistribusi secara normal dan layak digunakan sebagai data penelitian.

4.5 Uji Asumsi Klasik

Setelah dilakukan uji normalitas untuk mengetahui distribusi data penelitian, selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik sebelum menguji hipotesis. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

4.5.1 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode

sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan dengan menghitung nilai *Durbin-Watson d statistic* dengan kriteria Durbin-Watson 30 sampel adalah nilai DW dari masing-masing regresi harus berada diantara 1,496 dan 2,504 agar tidak mengalami masalah autokorelasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel IV.6 berikut :

Tabel IV.6 Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson 30 sampel

DW	KESIMPULAN
<1,363	Ada autokorelasi positif
1,363-1,496	Tanpa kesimpulan
1,496-2,504	Tidak ada autokorelasi
2,504-2,637	Tanpa kesimpulan
>2,637	Ada autokorelasi negatif

Sesuai dengan kriteria Durbin-Watson tersebut, dengan sampel sebanyak 30 nilai DW dari masing-masing regresi harus berada diantara 1,496 dan 2,504 agar tidak mengalami masalah autokorelasi. Hasil dari uji autokorelasi dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.7 Hasil Uji Autokorelasi

Dependent (Y)	<i>Durbin-Watson d statistic</i>	Kriteria	Kesimpulan
Motivasi	2,069	1,496-2,504	Bebas Autokorelasi
kepuasan	1,423	1,363-1,496	Tanpa Kesimpulan

Sumber: olahan data primer versi 16, lampiran 5-6

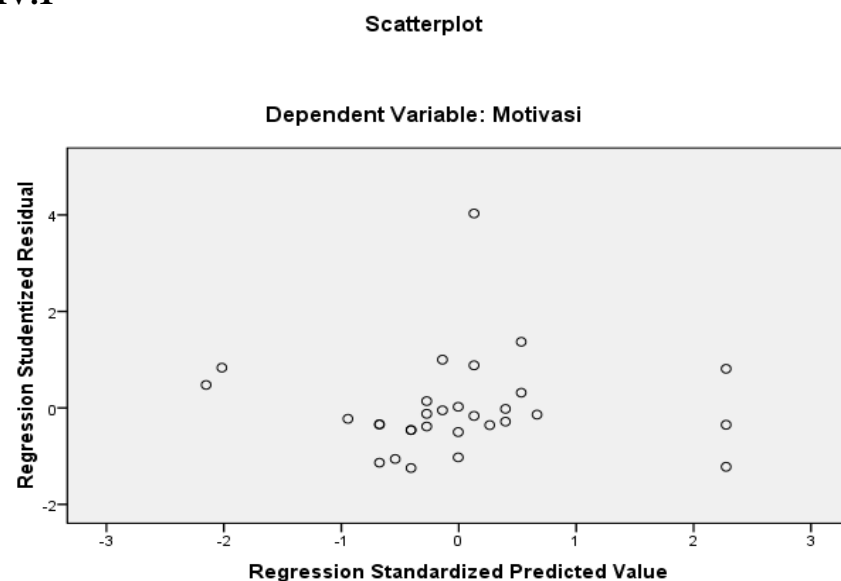
Dari hasil analisis menunjukkan nilai dw sebesar 2,069 untuk model regresi dengan variabel dependen motivasi Nilai dw sebesar 2,069 berada pada daerah bebas autokorelasi, yang berarti persamaan regresi dengan motivasi

sebagai dependent bebas dari gangguan autokorelasi. Untuk model regresi dengan kepuasan sebagai variabel dependen menunjukkan nilai dw sebesar 1,423 yang berada pada daerah tanpa kesimpulan. Artinya untuk model regresi dengan kepuasan sebagai variabel dependen, tidak dapat dinyatakan apakah model regresi tersebut mengalami autokorelasi atau tidak. Namun demikian, peneliti tetap melanjutkan analisis selanjutnya, yaitu pengujian hipotesis.

4.5.2 Uji Heteroskedastisitas

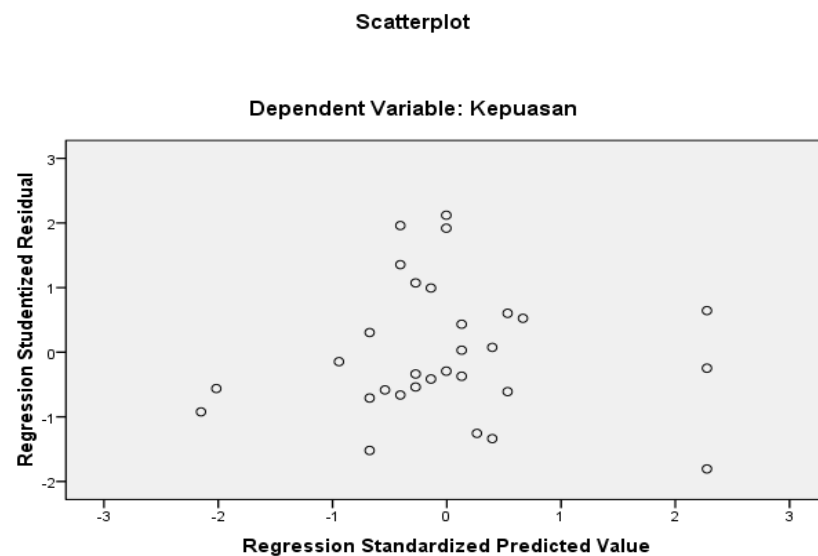
Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak konstan pada regresi sehingga akurasi hasil prediksi menjadi meragukan. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu observasi ke observasi yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut *homoskedastisitas*, dan jika berbeda disebut *heteroskedastisitas*. hasil dari pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini :

Gambar IV.1



Sumber: lampiran 6

Gambar IV.2



Sumber: lampiran 5

Dari grafik *scatterplots* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi motivasi dan kepuasan dalam membayar pajak berdasarkan masukan variabel independen penerapan PPh pasal 21.

Untuk mendukung hasil tes uji heteroskedastisitas, selain melihat dari grafik *scatterplots*, maka dilakukan Uji glejser pada penelitian ini. Yaitu nilai absolute residual diregresikan pada tiap-tiap variabel independen. Masalah heteroskedastisitas terjadi jika ada variabel yang secara statistik signifikan

(signifikansi < 0.05). Hasil dari uji glejser pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV.8 Hasil Uji Glejser

Dependent (Y)	Sig.	Kriteria	Kesimpulan
Motivasi	0,541	0,05	Bebas Heteroskedastisitas
kepuasan	0,141	0,05	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: olahan data primer versi 16, lampiran 8

Dari tabel IV.8 diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari kedua persamaan regresi linier sederhana setelah dilakukan uji glejser tidak ada yang lebih kecil dari 0,05 atau besar dari 0,05, artinya persamaan regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil ini mendukung analisis grafik yang telah dilakukan terlebih dahulu.

4.6 Analisis Regresi Sederhana

4.6.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Hasil analisis data untuk koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah :

Tabel IV.9 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Dependent (Y)	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Sig.</i>
Motivasi	0,655	0,000
kepuasan	0,230	0,004

Sumber: olahan data primer versi 16, lampiran 4-5

Terlihat dalam tabel IV.9 diatas bahwa nilai dari R^2 untuk persamaan regresi dengan motivasi sebagai dependen adalah 0,655, hal tersebut berarti bahwa 65,5 % variabel motivasi dapat dijelaskan oleh variabel independennya yaitu penerapan PPh pasal 21, sedang sisanya sebesar 34,5 % dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar regresi.

Sedangkan Koefisien Determinan (R^2) untuk kepuasan dalam membayar pajak sebagai variabel dependennya dilihat dari tabel diatas yaitu sebesar 0,230, hal tersebut berarti bahwa 23 % variabel kepuasan dapat dijelaskan oleh variabel independennya yaitu penerapan PPh pasal 21 Sedangkan sisanya sebesar 77 % dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar regresi.

4.6.2 Persamaan Regresi Sederhana

Pengujian terhadap hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi dipakai untuk mencari besarnya hubungan dan juga menentukan besarnya pengaruh variabel independen, yaitu karakteristik PPh pasal 21 terhadap variabel dependennya. Pada penelitian ini terdapat dua persamaan regresi dengan masing-masing variabel dependen adalah Motivasi dan kepuasan pegawai tetap dalam membayar pajak secara statistik dengan menggunakan alat bantu SPSS (*Statistic for Product and Service Solution*) versi 16.0. Analisis regresi sederhana pada penelitian ini dapat disusun dengan bentuk :

$$MO = \alpha + \beta_1 \text{ PPh} + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

$$KP = \alpha + \beta_2 \text{ PPh} + \varepsilon \dots\dots\dots(2)$$

Dimana :

MO = Motivasi pegawai tetap dalam membayar pajak

KP = Kepuasan pegawai tetap dalam membayar pajak

PPh = penerapan PPh pasal 21

α = Konstanta regresi atau intersep

β_1 = Koefisien regresi skor PPh pasal 21

β_2 = Koefisien regresi skor PPh pasal 21

Hasil analisis regresi sederhana pada penelitian ini disajikan pada tabel berikut :

Tabel IV.10 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Dependent (Y)	Constant	Koefisien Regresi PPh pasal 21
Motivasi	12,642	0,723
kepuasan	30,449	0,391

Sumber: olahan data primer versi 16, lampiran 5-6

Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan pada tabel IV.10 di atas, maka dapat dituliskan dua model persamaan regresi. Pertama adalah motivasi pegawai tetap dalam membayar pajak sebagai variabel dependen, yaitu :

$$MO = 12,642 + 0,723 \text{ PPh} + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Nilai intersep regresi di atas sebesar 12,642, hal ini dapat diartikan bahwa variabel MO (motivasi) akan bernilai 12,642 jika PPh pasal 21 bernilai 0. Koefisien regresi skor PPh pasal 21 sebesar 0,723, hal ini berarti jika skor PPh pasal 21 meningkat sebesar 1%, maka nilai motivasi pegawai akan meningkat sebesar 0,723, dan sebaliknya apabila terjadi penurunan nilai PPh pasal 21 sebesar 1% juga akan menurunkan nilai motivasi sebesar 0,723.

Untuk persamaan regresi yang kedua dengan kepuasan pegawai tetap dalam membayar pajak sebagai variabel dependennya yaitu :

$$KP = 30,449 + 0,391 PPh + \varepsilon \dots \dots \dots (2)$$

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa nilai intersep atau constant regresi adalah sebesar 30,449, hal ini menunjukkan bahwa nilai kepuasan pegawai akan bernilai 30,449 jika nilai PPh pasal 21 = 0. Koefisien regresi nilai PPh pasal 21 sebesar 0,391 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu persen (1%) nilai PPh pasal 21 akan meningkatkan nilai kepuasan pegawai tetap sebesar 0,391, dan sebaliknya apabila nilai penerapan PPh pasal 21 menurun sebesar 1% juga akan menurunkan nilai kepuasan pegawai sebesar 0,391.

4.6.3 Pengujian Hipotesis

a. Penerapan PPh pasal 21 berpengaruh positif terhadap motivasi pegawai tetap dalam membayar pajak.

Hipotesis pertama menyatakan bahwa PPh pasal 21 berpengaruh positif terhadap motivasi pegawai tetap dalam membayar pajak. Pengujian hipotesis pertama penelitian ini dilakukan dengan menggunakan formulasi hipotesis sebagai berikut :

$H_{01} : b_1 > 0.05$ Penerapan PPh pasal 21 tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi pegawai tetap dalam membayar pajak.

$H_{a1} : b_1 < 0.05$ Penerapan PPh pasal 21 berpengaruh signifikan terhadap motivasi pegawai tetap dalam membayar pajak.

Kriteria pengujian yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis (H_{a1}) di atas adalah : Jika koefisien regresi b_1 memiliki nilai $p\text{-value} < 0.05$ atau

nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak yang berarti penerapan PPh pasal 21 berpengaruh signifikan terhadap motivasi pegawai tetap dalam membayar pajak. Dan sebaliknya apabila $p\text{-value} < 0.05$ atau nilai $t\text{-tabel} > t\text{-hitung}$, maka H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak yang berarti penerapan PPh pasal 21 yang baik tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi pegawai tetap dalam membayar pajak. Hasil uji hipotesis dari penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV.11 Hasil Uji Hipotesis Pertama Motivasi sebagai Variabel Dependent

Variabel Independent (X)	t-hitung	t-tabel	Ket	$p\text{-value}$	Kriteria	Kesimpulan
PPh pasal 21	7,483	2,042	$> t\text{-hitung}$	0,000	0,05	H_{a1} diterima, H_{01} ditolak

Sumber: olahan data primer versi 16, lampiran 6

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($7,483 > 2,042$) dan nilai $p\text{-value}$ sebesar 0,000 lebih kecil dari α (0,05), sehingga hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh positif antara PPh pasal 21 terhadap motivasi pegawai tetap dalam membayar pajak dapat diterima atau H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak. Artinya penerapan PPh pasal 21 berpengaruh signifikan terhadap motivasi pegawai tetap dalam membayar pajak.

b. Penerapan PPh pasal 21 berpengaruh positif terhadap kepuasan pegawai tetap dalam membayar pajak.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa PPh pasal 21 berpengaruh positif terhadap kepuasan pegawai tetap dalam membayar pajak. Pengujian hipotesis

kedua penelitian ini dilakukan dengan menggunakan formulasi hipotesis sebagai berikut :

$H_{02} : b_2 > 0.05$ Penerapan PPh pasal 21 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan pegawai tetap dalam membayar pajak.

$H_{a2} : b_2 < 0.05$ Penerapan PPh pasal 21 berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pegawai tetap dalam membayar pajak.

Kriteria pengujian yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis (H_{a2}) diatas adalah, jika $p\text{-value} < 0.05$ atau nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak. Dan apabila nilai $p\text{-value} > 0.05$ atau nilai $t\text{-tabel} > t\text{-hitung}$, maka H_{a2} ditolak dan H_{02} diterima. Hasil anlasis regresi sederhana untuk hipotesis kedua penelitian ini, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.12 Hasil Uji Hipotesis Kedua kepuasan sebagai Variabel Dependent

Variabel Independent (X)	t-hitung	t-tabel	Ket	$p\text{-value}$	Kriteria	Kesimpulan
PPH pasal 21	3,105	2,042	$> t\text{-hitung}$	0,004	0,05	H_{a1} diterima, H_{01} ditolak

Sumber: olahan data primer versi 16, lampiran 5

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan regresi dengan kepuasan sebagai dependen memiliki nilai $p\text{-value}$ sebesar 0,004 dan $t\text{-hitung}$ sebesar 3,105. Karena $p\text{-value} < \alpha$ ($0,004 < 0.05$) dan nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($3,105 > 2.042$), berarti H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima, artinya variabel penerapan PPh pasal 21 berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pegawai tetap dalam membayar pajak.

BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan PPh pasal 21 terhadap motivasi dan kepuasan pegawai tetap PT. Muda Jasa Sarana Pekanbaru dalam membayar pajak, dan melalui latar belakang masalah hingga pada hasil pembahasan. Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini maka dalam bab ini penulis sajikan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran.

Kesimpulan, keterbatasan dan saran yang disampaikan dalam bab ini seluruhnya didasarkan pada hasil analisis data dan pengujian hipotesis. Adapun kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan

- a. Untuk mengukur pengaruh penerapan PPh pasal 21 terhadap motivasi dan kepuasan pegawai tetap PT. Riau Muda Jasa Sarana Pekanbaru, maka yang dijadikan variabel dependen adalah penerapan PPh pasal 21 (X). Sedangkan untuk variabel independen yaitu motivasi (Y1) dan kepuasan pegawai tetap (Y2).
- b. Hipotesis pertama menyatakan bahwa Penerapan PPh pasal 21 akan berpengaruh positif terhadap motivasi pegawai tetap dalam membayar pajak. Hasil analisis regresi sederhana untuk menguji hipotesis pertama menunjukkan nilai R^2 Adjusted sebesar 0,655 atau sebesar 65,5 % dan nilai p -value sebesar 0,000. Nilai R^2 Adjusted sebesar 65,5 % berarti perubahan yang terjadi pada motivasi pegawai dalam membayar pajak 65,5%

disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada penerapan PPh 21 oleh perusahaan, sementara sisanya sebesar 34,5 % disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. Selain itu, $p\text{-value}$ sebesar $0,000 < 0.05$ menunjukkan bahwa penerapan PPh pasal 21 berpengaruh secara signifikan terhadap nilai motivasi pegawai dalam membayar pajak.

- c. Hipotesis kedua menyatakan bahwa Penerapan PPh pasal 21 akan berpengaruh positif terhadap kepuasan pegawai tetap dalam membayar pajak. Hasil analisis regresi sederhana untuk menguji hipotesis kedua menunjukkan $p\text{-value}$ sebesar 0,004 dan $R^2\text{Adjusted}$ sebesar 0,230 atau sebesar 23%. $p\text{-value}$ sebesar $0,004 < 0.05$ yang berarti bahwa penerapan PPh pasal 21 oleh perusahaan akan berpengaruh positif terhadap kepuasan pegawai tetap dalam membayar pajak. Selain itu, nilai $R^2\text{Adjusted}$ sebesar 23 % menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada kepuasan pegawai dalam membayar pajak 23 % disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada penerapan PPh pasal 21, dan sisanya sebesar 77 % disebabkan oleh variabel-variabel lain diluar persamaan regresi misalnya : bonus yang diberikan, Pekerjaan itu sendiri (*Work It self*), Atasan (*Supervision*), Promosi (*Promotion*), Gaji atau Upah (*Pay*.)

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang harus diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya, diantaranya adalah :

- a. Masih terbatasnya cara atau alat untuk mengukur nilai penerapan PPh pasal 21 terhadap motivasi dan kepuasan pegawai tetap dalam membayar pajak.
- b. Pegawai tetap yang bersedia di survey masih sangat sedikit.
- c. Masih banyaknya pegawai yang telah memiliki NPWP tidak benar-benar mengetahui pajak PPh pasal 21 ini, atau pajak yang memotong gaji mereka.
- d. Nilai *Durbin-Watson d statistic* untuk model regresi dengan kepuasan sebagai variabel dependen terletak pada daerah tanpa kesimpulan. Namun, peneliti tetap melanjutkan kepada tahap selanjutnya yaitu uji hipotesis, dengan kurang teratasinya masalah autokorelasi dalam model regresi tersebut, maka hasil penelitian menjadi kurang kuat.

5.3 SARAN

- a. Penelitian ini perlu diuji dengan responden berbeda dan memperbesar jumlah sampel penelitian.
- b. Penelitian PPh pasal 21 ini, perlu dikembangkan juga pada perusahaan atau badan yang menyetorkan pajaknya langsung kepada pemerintah.
- c. Selain itu juga, pengaruh penerapan PPh pasal 21 ini dapat juga diuji dengan menggunakan alat uji yang belum digunakan pada penelitian ini.
- d. Sebaiknya perlu dilakukan lagi sosialisasi mengenai PPh pasal 21, agar wajib pajak lebih mengetahui pajak penghasilan, sehingga jika dilakukan penelitian terhadap pajak ini, peneliti tidak kesulitan untuk menemukan sumber yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran 1998. *Al-Quran dan Terjemahan*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Anastasia, Diana. 2004. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: PT. Andi Yogyakarta.
- Benny, Richard. 1997. *Sukses Memotivasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bohari. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ghozali, Imam, Prof. Dr. H. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan IV, Semarang : Badan Usaha Penerbit Undip.
- Hasan, Iqbal. 1999. *Statistik2*. Jakarta: PT. Penerbit Bumi Aksara.
- Kusuma, Indra, Subiyakto. 2000. *Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan*. Surabaya : PT. Usaha Nasional Surabaya-Indonesia.
- Mangkunegara, Prabu, Anwar. 2007. *Manajemen Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mathis, Robert. 2004. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: PT. Salemba Empat
- Nurmantussafri. 2005. *Pengantar Perpajakan* Jakarta: PT. kelompok Yayasan Obor Indonesia.
- Nursalim, Drs, M.Pd. 2002. *Pengantar Kemampuan Berbahasa Indonesia*. Pekanbaru : Susqa Press
- Rivai, Veithzal. 2004. *Manajemen Sumberdaya Manusia Perusahaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soemarso. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: PT. Salemba Empat.

- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak, Edisi 4*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Supramoto. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: PT. Andi Yogyakarta.
- Sutrisno. 2006. *Dasar-Dasar Keuangan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Thoha, Miftah. 2007, *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Umar, Husaein. 2003. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Waloyo. 2006. *Perpajakan Indonesia, Edisi 6*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Waluyo. 2000. *Perubahan Perundang-undangan Perpajakan Era Reformasi*. Jakarta: PT. Salemba Empat
- Winardi. 2001. *Motivasi dan Pemotivasian Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pengaruh Teori Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, April, 2008. <http://social-pajak.blogspot.com/2008/04/pengaruh-teori-motivasi-terhadap.html>
- Motivasi*, Oktober 14, 2009. <http://id.wikipedia.org/wiki/Motivasi>
- self assessment system pengaruhnya terhadap motivasi dan kepuasan wajib pajak*, Oktober 10, 2009. <http://t1k4r.wordpress.com/2009/10/10/pengaruh-penerapan-self-assessment-system-terhadap-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-badan-pada-kpp-dki-jakarta-khususnya-jakarta-pusat/>
- Zakat dan Pajak, 2008. <http://www.dakwatuna.com/2008/zakat-dan-pajak/>

DAFTAR TABEL

Tabel

III.1	Tabel Indikator Yang Mempengaruhi Variabel Independen	50
III.2	Tabel Indikator Yang Mempengaruhi Variabel Dependen	51
III.3	Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson	55
IV.1	Tabel Uji Reliabilitas	59
IV.2	Rekapitulasi Uji Validitas Variabel Motivasi	60
IV.3	Rekapitulasi Uji Validitas Variabel Kepuasan	61
IV.4	Deskriptif Variabel Penelitian	62
IV.5	Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas Variabel Penelitian	63
IV.6	Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson 30 sampel	64
IV.7	Hasil Uji Autokorelasi	65
IV.8	Hasil Uji Glejser	67
IV.9	Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	68
IV.10	Hasil Uji Regresi Linear Sederhana	70
IV.11	Hasil Uji Hipotesis Pertama Motivasi sebagai Variabel Dependent	72
IV.12	Hasil Uji Hipotesis Kedua kepuasan sebagai Variabel Dependent	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar

II.1 Motivasi Sebagai Pembangkit Dorongan	14
II.2 Model Teori Harapan	18
II.3 Skema Model Penelitian.....	40
IV.1 <i>Scatterplots</i> Variabel Dependen Motivasi	66
IV.2 <i>Scatterplots</i> Variabel Dependen Kepuasan.....	66